



**PARTAI GERINDRA:
Hapuskan Presidential
Threshold**

GEMA UTAMA >> 04



**KUE BARUASA
PEMBAWA BERKAH**

EKONOMI KERAKYATAN >> 12



**FADLI ZON
Biola Sang Maestro**

FIGUR >> 15

G E M A

TERBIT 16 HALAMAN/EDISI 15/TAHUN II/JULI 2012

INDONESIA RAYA

www.partaigerindra.or.id

GELORA

JAKARTA BARU

PEMILUKADA DKI Jakarta, 11 Juli 2012, sebuah peristiwa politik penting. Bukan hanya karena Jakarta ibukota negara, namun pertarungan itu melibatkan hampir semua kekuatan politik Indonesia. Partai-partai terbagi pada empat kandidat, dua pasang lain calon independen. Ada yang melihat Pemilu DKI merupakan miniatur Pilpres 2014. Pertarungan itu memperebutkan dua haluan: *status quo* atau perubahan.

Media luar biasa memberitakan hajatan besar ini. Selain mesin partai, tim sukses dan melawan ikut andil memenangkan calon gubernur yang mereka dukung. Pesta demokrasi Jakarta memang meriah. Tak hanya spanduk, baliho, stiker atau iklan yang menjadi media kampanye, nyaris semua peristiwa di Jakarta menjadi peristiwa politik.

Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mengusung Jokowi dan Basuki sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Jokowi, Wali Kota Solo itu, mulanya tak terlalu dikenal di Jakarta, apalagi dibandingkan petahana Fauzi Bowo. Basuki atau Ahok, yang datang dari Belitung, juga sedikit dikenal publik Jakarta. Pasangan ini termasuk yang datang paling belakangan dengan persiapan minimal.

Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Jokowi sederhana, rendah hati dan merakyat. Rekam jejaknya di Solo terbukti bagus, menjadi salah satu wali kota terbaik di dunia. Basuki lebih terbuka, cerdas, berani dan bicara lepas. Jokowi orang Jawa, Basuki beretnis Tionghoa. Keduanya nasionalis pengabdikan rakyat. Mereka masuk ke kampung-kampung, menembus beragam komunitas, muncul di iklan televisi, berdialog dari hati ke hati dengan warga Jakarta.

Hati, itulah yang kadang hilang dari kosa kata politik. Politik Indonesia didominasi transaksi jangka pendek minus etika apalagi hati. Ada pepatah, apa yang datang dari hati menembus hati. Hati, kunci kemenangan Jokowi-Basuki. Mereka berhasil merebut hati warga Jakarta. Hati telah mengalahkan politik uang dan rencana-rencana jahat kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Hati telah menggerakkan warga Jakarta yang semula apatis dengan politik. Banyak orang kehilangan kepercayaan pada figur pejabat di Republik ini. Kehadiran Jokowi-Basuki mengembalikan politik dengan hati.

Mesin kemenangan lain adalah kehendak perubahan. Warga Jakarta yang relatif cerdas dan dekat dengan informasi, merasakan pergulatan hidup sehari-hari. Ada kemacetan, banjir, kesenjangan yang makin menganga. Di sisi lain ada 140 triliun rupiah APBD DKI selama 5 tahun, seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk Jakarta. Pengalaman dan keahlian gubernur sekarang, tak terlihat memenuhi janji-janjinya.

Lautan kotak-kotak, seragam kampanye Jokowi-Basuki menjadi *trend* tersendiri. Kotak-kotak menjadi identitas yang menyeruak, simbol perubahan. Warga berbondong-bondong memakai baju kotak. Mereka datang ke kampanye Jokowi-Basuki tanpa pengerahan menggunakan bus, minibus atau truk. Warga secara sukarela ke Senayan ketika kampanye besar Jokowi-Basuki diselenggarakan. Terasa sekali Jakarta yang baru.

Jakarta Baru itulah perjuangan. Harapan itu di pundak Jokowi-Basuki untuk memenangkan putaran kedua Pemilu DKI. **FADLI ZON**



FOTO ALFIAN KARTIM

JOKOWI—AHOK MENANG TOTAL

KETUA Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bersyukur pasangan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) unggul dalam *quick count* Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. "Saya bersyukur. Mudah-mudahan putaran kedua hasilnya sesuai target dan perolehan dukungan lebih baik lagi," katanya di Jember, Kamis, 12 Juli 2012.

Dalam *quick count* Pilgub DKI Jakarta tak lama setelah pemungutan suara pada 11 Juli 2012, pasangan Jokowi-Ahok yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra berhasil menang total dengan meraih 42 persen lebih suara. Sementara pasangan *incumbent* Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) memperoleh suara 32 persen lebih. Suara kedua pasangan itu terpaut 10 persen. Hasil perhitungan suara yang dilakukan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) nantinya, berdasar pengalaman pemilu sebelumnya, tak akan jauh melenceng dari perhitungan *quick count* ini.

Dengan hasil itu, berarti pasangan Jokowi-Ahok dan pasangan Foke-Nara akan kembali bertarung di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, dua bulan mendatang. Itu artinya, harapan Foke untuk meraih kemenangan satu

putaran, seperti digembar-gemborkan pada saat masa kampanye atau sebelum Pemilu DKI Jakarta berlangsung tidak terbukti.

Menurut Prabowo, rakyat sekarang menginginkan pemimpin yang bersih, jujur, ikhlas, dan amanah. Karena itu, sejak lama rakyat menginginkan adanya perubahan-perubahan. "Alhamdulillah, bagi saya kemenangan Jokowi cukup mengarah kepada perubahan, seperti yang sudah lama diinginkan rakyat," katanya.

Dia juga menyatakan akan *all out* dalam upaya memenangkan pasangan Jokowi-Ahok dalam putaran kedua nanti. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah dengan menggalang koalisi dengan partai politik dan para pendukung pasangan lainnya. "Soal koalisi, siapa saja yang bersedia akan kita rangkul untuk memenangkan pemilihan pada putaran kedua," katanya.

Tak jauh berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan bahwa Jokowi-Ahok telah berhasil mengambil hati rakyat Jakarta yang menghendaki perubahan. "Saya kira Jokowi dan Ahok berhasil memenangkan hati dan pikiran warga Jakarta yang menginginkan perubahan. Mereka telah berhasil *winning heart and mind* warga Jakarta. Ini adalah *people power*, bukan *money power*," katanya.

Dia menegaskan, Jokowi dan Ahok akan mampu membawa perubahan di Jakarta. Buktinya, Jokowi yang masih menjabat Wali Kota Solo sudah mampu membawa perubahan di kota yang berjuluk "Spirit of Java" itu. Begitu juga dengan Ahok yang sudah mampu membawa perubahan di Belitung Timur saat menjabat sebagai bupati periode 2005-2010 sebelum akhirnya melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR periode 2009-2014. "Jokowi dan Ahok sudah menunjukkan kemampuannya mengubah Solo dan Belitung Timur. Saatnya Jakarta Baru, *New Jakarta*," kata Ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra itu.

Fadli Zon juga menilai, kemenangan yang diraih Jokowi-Ahok membuktikan bahwa rakyat Jakarta telah memberikan pilihan yang cerdas. "Pemilih Jakarta cerdas dan mampu memilih yang terbaik," kata Fadli.

Lebih jauh dia mengatakan, pada pertarungan di putaran kedua, Jokowi-Ahok akan menang kembali. "Dalam putaran kedua, saya yakin Jokowi-Ahok akan mengungguli kandidat lainnya," ucap lulusan Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) dan Master of Science (MSc) Development Studies dari The London School of Economic (LSE) Inggris itu. **BUDI SUCAHYO**

PATUK...!



Presiden SBY bilang secara persentase korupsi di Partai Demokrat berada di urutan ketiga, alias masih ada partai yang lebih korup.

Ha, ha, ha yang namanya korupsi ya korupsi, kok pakai urutan segala

Karena DPR menghambat pembangunan gedung baru KPK muncul reaksi spontan dari masyarakat untuk membantu KPK secara saweran.

DPR salah tingkah lagi... ambil sikap selalu bertentangan dengan keinginan rakyat.

Bantu Sosialisasikan Gerindra

Dengan hormat, Perkenalkan nama saya Totok Rachmad Prawoto. Saya bekerja sebagai perangkat desa di Desa Tamansari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Singkat kata, saya menyukai sosok Bapak Prabowo, khususnya dalam ketegangan dan kerakyatan.

Di desa kami, Gerindra belum begitu terkenal sehingga perlu disosialisasikan. Saya mengharapkan perubahan di desa saya, semoga Gerindra dapat membantu suksesnya pembangunan di desa saya.

TOTOK/ANTOK
+6281337338842

Mukjizat Gerindra

Dengan segala hormat, Saya bernama Lucky, minta mu'jizat lewat Gerindra. Saya bekas pengusaha, lagi benar-benar sulit (bangkrut). Saya liat di teve dan mencoba memberanikan diri kirim e-mail, harapan saya mendapatkan mu'jizat dari Tuhan lewat Gerindra.

Semoga Tuhan membalas pertolongan yang akan diberikan oleh Gerindra. Terima kasih.

LUCKY
021. 70855387

Perkenalan Produk Pertanian untuk Gerindra

Kami distributor resmi PT. Natural Nusantara (NASA) yang bergerak di bidang pendistribusian produk-produk Agrokomples (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan) berupa : pupuk organik, pestisida organik, dan suplemen organik tenak/ikan, ingin mengajak kerjasama kepada DPP Partai Gerindra di bidang pertanian dan perkebunan guna sukseskan program partai dalam menggalang dukungan massa untuk memenangkan pemilu 2014.

Kami siap menjadi *supplier* pupuk organik NASA yang dibutuhkan, dengan perjanjian pembayaran dibayar di muka (cash) dan barang siap kami kirim ke alamat pemesan.

Produk kami di bidang

pertanian dan perkebunan antara lain adalah : 1. Pupuk Organik Granule Modern (SUPERNASA G), minimal order 300 botol (isi 500 ml), 50 botol (isi 3 liter); 2. Pupuk Organik Cair Nusantara Subur Alami (POC NASA), minimal order 150 sak; 3. Hormon Pertumbuhan Organik (HORMONIK), minimal order 400 botol (isi 100 ml), 80 botol (isi 500 ml).

Produk kami sudah teruji di lapangan, karena produk kami sangat berkualitas yang diproses dari bahan-bahan alami melalui teknologi yang canggih dan modern dengan prinsip "zero emission concept", sehingga mampu meningkatkan hasil produksi pertanian 2x lipat dari sebelumnya. Sebagai contoh, padi yang tanpa menggunakan produk kami berproduksi rata-rata 6-8 ton/hektar gabah kering, tetapi setelah menggunakan produk kami mampu berproduksi rata-rata 15 ton/hektar gabah kering.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara Partai Gerindra dan kami.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Distributor PT. Natural Nusantara (NASA),
(KRISNA ADIWIJAYA)

Air untuk Kampanye

Salam hangat, Kami dari CV. Minatama menawarkan program unit air minum *mobile* sebagai sarana kampanye tepat guna bagi Partai Gerindra. Kami adalah pionir perancang sarana unit pengolah air minum, dan terdaftar sebagai konseptor SNI buat pengolahan air bersih

Produk kami sudah teruji di PDAM, Dinas Kelautan dan Perikanan, juga bencana alam, pada kampanye partai lain, dan perusahaan atau pabrik-pabrik makanan dan minuman

Kami berniat membuat kerjasama eksklusif dengan Partai Gerindra yang saling menguntungkan, berikut gambaran sebagian proyek yang sudah kami jalankan.

TOM HARYANTO
(direktur)



ILUSTRASI SUSTHANTO

WNI dan Partai Gerindra

Saya adalah pengangum Bapak Prabowo dan Bapak Permadi, SH. Saya WNI keturunan Tionghoa dan berdomisili di Kota Surabaya. Jika saya ingin mendaftar sebagai anggota Gerindra apakah diperbolehkan? Karena saya WNI keturunan Tionghoa.

Mohon informasi dan petunjuknya, terima kasih.

DAVID LEE

Terima kasih atas perhatiannya. Anggota Partai Gerindra adalah seluruh Warga Negara Indonesia. Partai Gerindra tidak membedakan keturunan, ras, agama dan lain-lain (SARA). Jadi setiap WNI boleh dan sama kedudukannya di Partai Gerindra.

Bergabung dengan Partai Gerindra

Salam, Perkenalkan nama saya, Winto, 27 tahun, berdomisili di Jakarta, dan pendidikan terakhir S-2 Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia. Saya tertarik dengan platform partai Gerindra yang mengutamakan kebijakan untuk mewujudkan

keadilan sosial dengan tidak melupakan masyarakat kecil.

Saya sendiri belum pernah bergabung dengan partai politik, namun saya merasa harus turut berpartisipasi dalam politik, karena merasa perlu berbuat sesuatu buat masyarakat kecil yang sering jadi korban ketidakadilan, dan saya juga melihat apa yang saya ingin perjuangkan bisa terwakili di Partai Gerindra.

Pertanyaan saya: 1. Bagaimana cara bergabung dan dapat mengenal lebih jauh visi dan misi partai?; 2. Seperti apa jenjang kaderisasi di Partai Gerindra?

Saya sendiri memiliki pengalaman memimpin organisasi mahasiswa, serta beberapa kali diundang ke luar negeri untuk belajar mengenai kehidupan rakyat kecil.

Terima kasih sebelumnya dan semoga sukses.

WINTOMO TJANDRA

Terima kasih atas perhatian Anda pada Partai Gerindra. Untuk bergabung dengan Partai Gerindra sangatlah mudah. Datang langsung ke DPC atau DPD di mana Saudara berdomisili. Atau juga bisa pendaftaran online di www.partaigerindra.or.id.

Jenjang kaderisasi di Partai Gerindra sangat jelas dan ada tingkatannya.

Ide untuk Tokoh

Dengan hormat, Pilpres 2014 masih dua tahun lagi, tetapi kandidat sudah mulai bermunculan. Baik yang sudah mengumumkan secara terang-terangan maupun yang melalui isyarat. Tampil lebih awal tentu lebih baik, karena banyak waktu untuk sosialisasi. Dan berkesempatan lebih luas membuat langkah-langkah yang mengundang simpati.

Melalui email ini kami ingin menjual ide/gagasan kepada sang tokoh (capres), yaitu berupa langkah inovatif yang bisa menarik simpati masyarakat. Langkah mengesankan yang tidak disangka-sangka, yang mengesankan dan membuat *surprise*. Yang pada gilirannya menimbulkan rasa simpati masyarakat dan dorongan untuk ikut terlibat di dalam langkah atau gerakan itu.

Hasil yang diharapkan dari ide ini adalah lahirnya suatu gerakan yang melibatkan sebanyak mungkin orang dari berbagai lapisan masyarakat, yang solid dengan kekuatan lahir dan batin. Atau setidaknya gerakan

itu dapat merebut simpati masyarakat luas. Dengan demikian bukan hanya sang tokoh yang akan terangkat, tetapi tentu juga popularitas komunitas atau partainya akan ikut naik.

Berkenaan dengan penawaran ini, rasa bahagia kami apabila Bapak/Ibu berkenan menanggapi email ini, baik melalui surat, email ataupun telepon yang tersebut di bagian bawah email ini. Akhirnya, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila tidak berkenan.

PARMINTO
Jl. Randusari Utara No. 1
RT 02/ RW 17
Antapani Kidul, Bandung
Email: totok1956@gmail.com

RALAT

Tabloid Gema Indonesia Raya edisi: 14/taahun II Juni 2012, pada Rubrik Wawancara terdapat kesalahan. Jabatan Prof. DR. Sardjana, dr. Sp. OG (K), SH, disebut Ketua Umum Kesira. Yang betul adalah Ketua I (Bidang Klinik dan Ambulans) Kesira. Mohon maaf atas kekeliruan ini.

Redaksi

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA

Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12160
Telp: 62-21-789 2377, 780 1396
Fax : 62-21-781 9712
Email: info@partaigerindra.or.id

**GEMA
INDONESIA RAYA**

Pembina: Prabowo Subianto **Pemimpin Umum:** Hashim Djojohadikusumo **Pemimpin Redaksi:** Fadli Zon **Wakil Pemimpin Redaksi:** M. Asrian Mirza **Dewan Redaksi:** Suhardi, Halida Hatta, Widjono Hardjanto, Ahmad Muzani, Martin Hutabarat, Amran Nasution, Kobalen, **Redaktur Pelaksana:** Syahril Chilli **Redaktur:** Budi Sucahyo, Helvi Moraza, Subuh Prabowo, Yong W Pati (Artistik), Alfian Kartim (Foto) **Staf Redaksi:** Agustaman, Iman Firdaus, M. Budiono, Wahyu Mahardhika **Sekretaris Redaksi:** Wendra Wizar **Riset:** Hasby M Zamri, **Website:** Alexander M Manurung **Sirkulasi dan Distribusi:** Juanda Nurhakim **Umum:** Agung Budiarto, Ari Sobari **Penerbit:** Badan Komunikasi Partai Gerindra **Alamat Redaksi dan Usaha:** Jl. Danau Jempang B II No 13, Bendungan Hilir, Jakarta 10210 Telp.: 62-21 5785 3480 Fax.: 62-21 5785 2552 Email: redaksi_gir@partaigerindra.or.id atau redaksi_gir@yahoo.com, Facebook.com/Gerindra, Twitter: @Gerindra

Redaksi menerima artikel, berupa berita ataupun kolom serta foto dari anggota, pengurus pusat dan daerah serta simpatisan Partai Gerindra. Khusus untuk kalangan simpatisan diharap menyertakan identitas diri. Tulisan bisa dikirim via email ataupun pos.



ANAS PUN Hanya Jadi Saksi

OLEH AMRAN NASUTION

(Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra)

INDONESIA negara gagal? Isu itu ramai diperdebatkan setelah bulan ini Majalah *Foreign Policy* dari Washington, Amerika Serikat, mengumumkan survei yang menempatkan Indonesia di peringkat 63 daftar negara gagal (*failed state*).

Ada 177 negara di dunia yang diteliti. Somalia di Afrika menduduki peringkat pertama negara paling gagal, disusul Kongo di peringkat kedua dan Sudan ketiga (semua dari Afrika).

Yang paling tidak gagal adalah Finlandia, negara Eropa di kawasan Skandinavia yang makmur. Dia menempati ranking 177 atau paling buntut dari negara yang diteliti. Lalu disusul Swedia (176) dan Denmark (175), juga dari kawasan sama.

Indikator yang digunakan *The Fund for Peace*, LSM dari Washington yang melakukan penelitian dan masih satu grup dengan *Foreign Policy*, untuk mengukur kegagalan sebuah negara: Bagaimana hukum ditegakkan dan seberapa efektif pemerintahan dijalankan. Itu bisa dilihat dari tingkat kriminalitas di sebuah negara, mulai ancaman terorisme sam-

pai serangan bajak laut, atau tersebar luasnya korupsi.

Peringkat 63 untuk Indonesia sebenarnya cukup jelek. Dulu di tahun 2000-an, Indonesia pernah menempati urutan di atas 100. Kemudian peringkat korupsi Indonesia terus memburuk dan tahun ini Indonesia berada di peringkat 63, hampir serupa dengan tahun sebelumnya peringkat 62.

Sri Mulyani dan Budiono

Padahal di tahun 2002, Presiden Megawati meresmikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), lembaga independen yang tak tunduk kepada pemerintah, dengan tugas khusus memberantas korupsi.

Nyatanya kehadiran KPK – dengan imbalan gaji tinggi -- tak berbanding lurus dengan penurunan tingkat korupsi. Kenapa? KPK tampaknya cenderung bermain politik pencitraan. Mereka menjebak dan menangkap basah pejabat rendahan – paling tinggi gubernur – yang terima suap. Lalu mempublikasikannya besar-besaran kepada wartawan. Pejabat

“Korupsi tambah meluas karena KPK hanya main politik. Yang ditangkap hanya pejabat yang tak punya backing politis....”

yang secara politis kuat tak mereka sentuh.

Contoh konkret adalah kasus Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun dan melibatkan Menteri Keuangan pada waktu itu, Sri Mulyani dan Gubernur BI Budiono (kini Wapres), malah menyerempet nama Presiden SBY. Perkara itu sampai sekarang dipetiskan KPK.

Kasus Hambalang yang melibatkan para tokoh Partai Demokrat yang berkuasa juga membuat KPK grogi dan tampak tak serius. Coba, sudah 76 saksi mereka periksa tapi belum satu pun dinyatakan sebagai tersangka, apalagi ditangkap.

Karena tekanan publik yang begitu keras, 27 Juni lalu, akhirnya KPK memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, tokoh yang disebut-sebut paling sentral dalam perkara Hambalang. Itu pun dia cuma berstatus saksi, bukan tersangka. ◀

ILUSTRASI YONG W PATI

HANCURNYA Usaha Garmen Kita



TABRANI SYABIRIN

Ketua Fraksi Gerindra Prop Banten, Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Cinta Prabowo (PERMATA PRABOWO), SEKJEN DPP, Dewan Masjid Indonesia (DPP DMI), Wakil Sekjen HKTI.

ILUSTRASI YONG W PATI



PEDAGANG pakaian yang biasanya berbelanja pakaian di Pasar Tanah Abang banyak yang terkaget-kaget karena sebagian besar pakaian yang dijual di sana merupakan produk impor dari Cina. Mulai dari pakaian anak-anak, dewasa dan orang tua, sampai pakaian muslim seperti baju koko, sajadah, busana muslimah produk Cina. Bahkan pakaian batik dangan semua produk turunannya juga diimpor dari Cina.

Pasar grosir Tanah Abang yang sebelumnya menjadi ikon UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) garmen terbesar sebagai pasar tekstil dan produk tekstil saat ini sudah berubah. Dalam ratusan kios yang tersusun, yang ada adalah garmen dari Cina. Kalaupun ada barang dari Soreang, Ciamis, Pekalongan, Solo, dan Jatim volumenya sangat sedikit dan harganya lebih mahal dari barang impor Cina. Hanya dalam hitungan tahun perajin garmen tradisional tergusur oleh barang-barang Cina.

Kalau kita lihat sebagian buruh (TKI/TKW) yang dikirim ke Hongkong juga bekerja di sektor garmen.

Kebijakan Pemerintah.

Salah satu palu godam yang membuat daya saing perajin garmen mati suri adalah kebijakan pemerintah yang tetap melihat sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai *sun set* industri yang tidak layak ditolong untuk kemudahan fasilitas kredit perbankan. Krisis 1998 memang sektor tekstil ini banyak bermasalah. Penilaian seperti ini jelas tidak benar. Harus diakui sektor tekstil kita kalah dengan Cina, karena kapas sebagai bahan baku tekstil memang tumbuh subur di negara bermusim seperti Cina. Tapi sektor garmen berbeda dengan tekstil. Industri garmen lebih menitik beratkan pada sektor *skill* manusianya. Kualitas produk serta membuka lapangan kerja.

Dari segi kualitas, garmen hasil jahitan penjahit Indonesia tidak diragukan lagi. Dari segi kualitas, baju-baju impor dari Cina masih di bawah mutu garmen Indonesia. Karena itu beberapa merk terkenal, seperti *Wall Mark*, *Kenzo*, membuka pabrik garmennya di Indonesia. Pilihan Indonesia sebagai tempat produksi garmen jelas karena kualitas jahitan yang bagus, selain itu juga karena upah buruh yang sangat murah.

Dari sudut devisa, garmen menjanjikan pangsa pasar yang sangat besar. Dari 6 miliar penduduk dunia, belanja pakaian sekitar US\$ 600 miliar, dengan volume belanja US\$ 100 per orang per tahun. Eropa, Rusia, Amerika, dan Kanada, serta Australia dengan penduduk hampir 1,5 miliar dengan tingkat *income* perkapita hampir US\$ 40.000. Mereka berbelanja pakaian US\$ 300 per individu per tahun. Kue ekspor ini diraup Cina sekitar 54%, US\$ 324 miliar. Adapun Indonesia hanya mengisi 5%-nya, sekitar US\$ 30 miliar saja.

Di tataran global, produk garmen kita kalah dalam merebut pangsa pasar. Di kandang sendiri juga tidak berdaya. Pemerintah memang pihak pertama yang harus kita persoalkan, karena akibat kebijakan yang salah telah membawa akibat serius dan sistemik. Kucuran kredit perbankan yang ditutup rapat mengakibatkan perajin garmen mencari pinjaman

kepada rentenir.

Untuk melihat modus operandi rentenir garmen, surveilah ke salah satu sentra perajin garmen di Soreang, Bandung. Di sana, kita akan melihat bagaimana perajin garmen meminjam uang untuk modal usaha kepada rentenir. Pinjaman itu biasanya dalam bentuk bahan, upah kerja. Setelah diproduksi, dibawa ke grosir di Tanah Abang. Oleh pedagang di Tanah Abang, pakaian tersebut dibayar dalam bentuk giro mundur. Antara 1-3 bulan, dengan keuntungan 25-30%. Kalau volume penjualan 50 juta, maka keuntungan paling tinggi Rp 15 juta.

Ketika perajin ini kembali ke Bandung, mereka sudah tidak punya uang kontan untuk memulai produksi. Giro mundur tadi harus di “bakar” di tempat pejualan bahan, biasanya di Gang Tamin, Bandung, dengan 5-7% per bulan. Kalau 3 bulan maka dipotong sampai 20% atau Rp 10 juta. Uang yang tersisa sekitar Rp 40 juta, kembali diganti dengan bahan tekstil sisanya untuk upah kerja. Hanya dalam waktu singkat perajin kehabisan modal.

Hasil produksi juga tidak kompetitif. Jika kita hitung perajin bisa membayar bunga sampai 60% setiap tahunnya. Sementara di Cina bunga bank hanya 5% per tahun. Gambaran ini dapat memberi jawaban mengapa perajin garmen kita tidak berdaya di rumah sendiri. ◀

Partai Gerindra: Hapuskan *Presidential Threshold*

Partai Gerindra mengusulkan, ketentuan *presidential threshold* dihapus saja, karena mencederai UUD. Sementara pengamat politik LIPI Syamsudin Haris berpendapat, semua partai yang lolos *parliamentary threshold* berhak mengajukan capres dan cawapres.

OLEH BUDI SUCAHYO

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) tak lama lagi akan membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu Presiden (RUU Pilpres). RUU ini merupakan salah satu dari paket undang-undang bidang politik yang akan diselesaikan sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu 2014.

Pembahasan RUU Pemilu Presiden diperkirakan akan "panas". Ini disebabkan munculnya wacana penghapusan *presidential threshold*, yaitu ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres). Dalam wacana itu ada perbedaan pandangan antara partai politik besar dengan partai politik menengah dan kecil.

UU No. 42 Tahun 2008 yang menjadi dasar dalam pemilu presiden pada tahun 2009 dalam Pasal 9 disebutkan: "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden."

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Syamsudin Haris menilai persyaratan pengajuan capres dan cawapres seperti itu tidak masuk akal. "Dengan syarat itu hanya partai besar yang bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres. Ini tidak masuk akal," katanya ketika berbicara dalam Dialog Pilar Kebangsaan dengan tema "Konstitusi dan Proses Pencalonan Presiden Jelang Pilpres 2014" di Gedung Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Syamsudin Haris, dari pengalaman pemilu presiden 2009, hanya satu partai yang memenuhi syarat mengajukan capres dan cawapres itu, yaitu Partai Demokrat. "Syarat ambang batas ini akan



Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009, di Bantar Gebang

membatasi pengajuan capres dan cawapres," ujarnya.

Dia lalu membandingkan dengan Pemilihan Presiden di Timor Leste yang diikuti sebanyak 12 capres padahal jumlah penduduknya hanya satu juta jiwa. Sebaliknya, Indonesia yang jumlah penduduknya 240 juta jiwa dengan wilayah geografis yang luas hanya memunculkan tiga atau empat pasangan capres dan cawapres.

Karena itu, Syamsudin Haris mengusulkan pada pembahasan RUU Pilpres untuk Pemilu 2014 syarat pengajuan capres dan cawapres itu dibatasi pada partai yang lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 3,5% sesuai ketentuan dalam UU Pemilu yang baru disahkan. Setiap partai yang lolos ambang batas 3,5% itu boleh mengajukan capres dan cawapres. "Cukup dengan persyaratan ambang batas 3,5% di parlemen, partai politik bisa mengajukan capres dan cawapres," usulnya.

Dari simulasi yang dilakukan, sedikitnya ada 7 parpol yang bisa lolos ambang batas parlemen itu. Dengan demikian, ada 7 pasangan capres dan cawapres yang diajukan untuk pilpres sehingga rakyat memiliki banyak pilihan.

Namun, usulan itu tampaknya akan ditolak beberapa partai besar.

Partai Golkar, misalnya, mengusulkan agar *presidential threshold* tidak mengalami perubahan alias tetap di angka 20%. Dengan ambang batas sebesar itu maka pasangan capres dan cawapres tidak terlalu banyak, berkisar 4-5 pasangan.

Tidak jauh berbeda, PDI Perjuangan juga akan mempertahankan *presidential threshold* pada angka itu. Sebaliknya, partai besar lain, yaitu Partai Demokrat mau menurunkan syarat pencalonan pasangan capres dan cawapres dalam pemilu 2014 mendatang dikisaran 15% kursi DPR dan 15% suara sah nasional.

Di sisi lain, beberapa partai lain seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura, mengusulkan agar partai yang lolos *parliamentary threshold* (PT) dalam pemilu legislatif bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres. Dengan kata lain, partai-partai itu mengusulkan *presidential threshold* sebesar 3,5%.

Dihapus

Bagaimana dengan Partai Gerindra? Partai Gerindra menginginkan *presidential threshold* (PT) sebesar 20% suara pemilu legislatif (pileg) dihapus. Ketua Umum Partai Ge-

rindra, Prof. Dr. Suhardi menegaskan bahwa ambang batas sebagai syarat pengajuan pasangan capres dan cawapres tidak diperlukan. "Sangat tidak diperlukan karena ambang batas itu mencederai UUD NRI Tahun 1945," katanya kepada *Gema Indonesia Raya*.

Menurut Suhardi, dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya ada dua syarat pengajuan pasangan capres dan cawapres, yaitu warga negara Indonesia dan diusung oleh partai dan gabungan partai. Tidak disebutkan dalam UUD itu adanya syarat ambang batas. "Kalau ada syarat lain di luar dua syarat itu maka akan bertentangan dengan UUD. Sebab, setiap orang seharusnya berhak dicalonkan menjadi tidak berhak," jelasnya.

Karena itu, Suhardi menegaskan bahwa persyaratan 20% kursi di parlemen dan 25% suara nasional sebagai syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres bertentangan dengan UUD. "Persyaratan 20% kursi parlemen dan 25% suara nasional pada tahun 2009 itu sebenarnya sudah melanggar UUD. Apalagi kalau persyaratan ini dipakai lagi, ya akan bertentangan dengan UUD," ujarnya.

Dalam pandangan Suhardi, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 itu setiap partai yang sudah diakui dan

disahkan Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres. Partai yang tidak lolos *parliamentary threshold* pun sebenarnya mempunyai hak itu. "Nanti akan dilihat rakyat. Mungkin pada putaran pertama akan banyak pasangan capres dan cawapres, tapi pada putaran kedua akan sedikit," katanya.

Jika usulan menghapus *presidential threshold* itu ditolak di dewan, Partai Gerindra lebih memilih opsi lain, yaitu angka *presidential threshold* disamakan dengan *parliamentary threshold*, yaitu sebesar 3,5%. Artinya, semua partai yang lolos *parliamentary threshold* 3,5% atau setiap partai di DPR boleh mengajukan pasangan capres dan cawapres.

"UUD hanya menyebut calon presiden atau calon wapres diajukan parpol atau gabungan parpol. Menurut saya sebaiknya dikembalikan ke UUD 1945 saja. Jadi semua partai yang lolos ke DPR berhak mengusulkan pasangan capres dan cawapres," kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, kepada pers di Gedung DPR, beberapa waktu lalu.

Menurut Muzani, seharusnya rakyat diberikan pilihan capres yang lebih banyak. Karena itu syarat pencapresan seharusnya dipermudah. ◀

KETUA UMUM PARTAI GERINDRA, PROF. DR. SUHARDI:

Pemilu 2014, Kita Lebih Optimistis

PEMILIHAN Umum 2014 tersisa kurang dari dua tahun lagi. Waktu yang tidak terlalu lama bagi partai politik untuk mempersiapkan diri menghadapi hajatan demokrasi lima tahunan itu. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pun tengah menyelesaikan paket UU Bidang Politik yang mengatur pelaksanaan Pemilu 2014. Bagaimana persiapan Partai Gerindra? Berikut wawancara *Gema Indonesia Raya* dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prof. Dr. Suhardi yang berlangsung di Kantor DPP Partai Gerindra, Jl. HR. Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat 22 Juni 2012. Petikannya:

DPR telah mengesahkan UU Pemilu setelah mencapai kata sepakat tentang beberapa isu krusial. Bagaimana bapak melihat UU Pemilu itu?

Secara pribadi, saya ingin mengomentari tentang UU Pemilu, khususnya tentang aturan pelaksanaan sistem pemilu terbuka. Menurut saya, dengan sistem pemilu proporsional terbuka itu maka akan membuat beban biaya calon legislatif menjadi besar. Kalau pengelolaan biaya tidak dilakukan secara efisien dan efektif, maka dikhawatirkan akan berdampak negatif, yaitu mungkin bisa berkembang menjadi korupsi ketika sudah terpilih menjadi anggota dewan.

Sistem pemilu terbuka itu juga tidak menjamin kualitas dari anggota

DPR yang terpilih nanti lebih baik dari sebelumnya. Tapi, sistem itu sudah diputuskan, karena itu sebaiknya partai politik melakukan seleksi lebih ketat secara internal. Kita (Partai Gerindra) akan melakukan *mapping* (pemetaan) terhadap caleg-caleg agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat secara internal.

Ada partai yang justru memberikan dana kepada caleg yang jumlahnya cukup besar Rp 5 sampai Rp 10 miliar. Bagaimana menurut Bapak?

Menurut saya, hal itu kurang *educated*. Seorang calon pemimpin harus mampu mengajari masyarakatnya mandiri dan mengajari agar tidak terpengaruh dengan *money politics*. Sehingga, menurut saya, ini adalah pendidikan politik yang bisa menyedatkan. Partai Gerindra akan mendidik kepada calon legislatif, kepada rakyat, agar mereka sadar bahwa dengan cara *money politics* tidak akan memberikan hasil yang baik.

Pemimpin yang baik bukan pemimpin yang didasari pada uang tetapi lebih pada *leadership*-nya, bagaimana kemampuan menciptakan peluang-peluang, efisien dalam pemanfaatan dana, dan mencari peluang mendapatkan dana bukan dari langit atau sumbangan siluman dari antah berantah.

UU Pemilu itu juga menetapkan *parliamentary threshold* secara nasional sebesar 3,5%. Bagaimana kesiapan Partai Gerindra?

Sebenarnya kita (Partai Gerindra) tidak tergantung pada besarnya *parliamentary threshold* (PT). Penerimaan itu sesungguhnya untuk menyalurkan aspirasi bahwa negara Indonesia ini sebuah negara besar yang berbeda dengan negara lainnya karena keragaman, banyak sekali bahasa dan budayanya. Keputusan itu cenderung untuk mempertimbangkan keterwakilan aspirasi yang ada.

Tentu saja kita siap dengan PT itu. Tidak ada masalah. Pada Pemilu tahun 2009 sebenarnya kita sudah melewati ambang batas. Kita sudah mencapai 10%. Pada daerah-daerah di Pulau Jawa yang padat penduduknya, kita sudah mencapai 10%. Kalau di pusat (DPR) kita hanya mendapat 4,6% pada Pemilu 2009, maklum karena kita merasa ada kecurangan-kecurangan. Kita merasa aneh karena di provinsi mendapat 10% tetapi di pusat hanya 4,6%.

Untuk pemilu 2014, kita lebih optimistis. Apalagi sekarang kita sudah punya kepengurusan sampai ke bawah, sampai ke anak ranting. Kita juga sudah melakukan pelatihan kader sampai 21 angkatan. Kita juga sudah memiliki gubernur, bupati dari Gerindra. Jadi kekuatan

kita riil di lapangan dan kader kita di masyarakat, sudah jauh sekali dibandingkan tahun 2009. Pada pemilu 2009 saja kita sudah seperti itu, tentu saja kita sangat optimistis dengan pemilu 2014.

Setelah UU Pemilu disahkan, RUU yang akan dibahas adalah RUU Pemilihan Presiden (Pilpres). Dalam hal ini, ada isu krusial menyangkut *presidential threshold* atau persyaratan ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Bagaimana tanggapan Bapak?

Menurut saya ambang batas untuk parpol atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres itu sangat tidak perlu dan mencederai UUD NRI Tahun 1945. Dan saya tetap mengatakan bahwa UU yang berkenaan dengan UUD, seharusnya tidak boleh bertentangan.

Di mana letak bertentangan-nya?

Dalam UUD NRI Tahun 1945, syarat calon presiden hanya dua, yaitu warga negara Indonesia dan diusung oleh partai atau gabungan partai politik. Kalau kemudian ada syarat lain di luar dua syarat itu maka bertentangan dengan UUD, karena seharusnya orang berhak maju sebagai calon presiden kemudian menjadi tidak berhak. UU itu seharusnya untuk memperjelas dan mempermudah, bukan bertentangan dengan UUD.

Persyaratan 20% kursi di parlemen dan 25% suara sah secara nasional pada Pemilu 2009 itu sebenarnya sudah merupakan pelanggaran UUD. Kalau nanti diulangi lagi, ya akan bertentangan dengan UUD.

Lalu, apa ukuran partai atau gabungan partai untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres?

Di dalam UUD NRI Tahun 1945, pasangan capres dan cawapres diajukan partai atau gabungan partai. Kalau partai sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres. Memang nanti akan banyak pasangan capres dan cawapres. Biasa. Pada awalnya bisa banyak, karena hak seseorang. Tapi, masyarakat akan memilih. Pada pemilihan putaran pertama mungkin banyak. Tapi, pada pemilihan putaran kedua sudah menyempit. Calon yang tidak didukung rakyat pasti sudah berguguran. Nanti hanya dua atau tiga pasangan capres dan cawapres.

Apakah tidak mungkin jumlah pasangan capres dan cawapres diperkecil?

Kita sudah punya UUD yang mengatur pengajuan capres dan cawapres, mengapa harus kita langgar? Kalau ada UU di bawah yang bertentangan dengan UUD, itu namanya pelanggaran. UU itu tidak sah. Jadi, persyaratan ambang batas pengajuan capres dan cawapres itu hanya permainan partai besar agar bisa mengalahkan calon yang populer dari partai yang tidak terlalu besar.

Jadi, ambang batas pengajuan pasangan capres dan cawapres harus dihapuskan?

Ya. UUD NRI Tahun 1945 sudah dengan sangat jelas dan tegas tertulis bahwa pengajuan pasangan capres dan cawapres oleh partai atau gabungan partai. Saya tidak tahu, apakah elite ini pura-pura tidak tahu. Kalau dibiarkan ini berbahaya karena sudah melanggar UUD. Pedomannya sudah ada, yaitu UUD. Mengapa kemudian kita mengabaikan dan membuat rekayasa? Kalau memang ingin ada ambang batas, kita sepakat dulu UUD NRI Tahun 1945 diamandemen lagi.

Fraksi Partai Gerindra di DPR akan memperjuangkan penghapusan *presidential threshold*?

Ya. Kita juga akan menyiapkan *judicial review* tentang aturan ambang batas pengajuan pasangan capres dan cawapres itu, karena jelas-jelas merupakan pelanggaran luar biasa terhadap UUD. ◀



PEMILUKADA DKI JAKARTA

Pasangan Jokowi-Ahok
Menang Telak

FOTO: FOTO ALFIAN KARTIM

Prabowo bersama Jokowi dan Ahok

HARI pencoblosan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta pada Rabu, 11 Juli 2012, menjadi hari yang tak akan terlupakan bagi Fauzi Bowo, calon gubernur (Cagub) *incumbent*. Pada hari itulah Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo, yang berpasangan dengan calon wakil gubernur (Cawagub) Nachrowi Ramli atau Nara mendapat "pukulan telak" tepat menusuk dada *incumbent*.

Bahkan diluar dugaan, pasangan Cagub Joko Widodo (Jokowi) dan Cawagub Basuki (Ahok) —pasangan yang masing-masing pernah memperoleh penghargaan sebagai tokoh anti korupsi — berhasil menumbang pasangan Foke-Nara. Di Kelurahan Gondangdia — tempat kediaman Foke — cagub *incumbent* ini, menurut perhitungan suara resmi dilakukan panitia pemungutan suara (PPS) Kelurahan Gondangdia, Foke-Nara hanya berada di peringkat kedua, dengan meraih hanya 620 suara. Peringkat pertama di kandang Foke itu direbut oleh pasangan Jokowi-Ahok, 1.073 suara.

Kemenangan pasangan Jokowi-Ahok di Gondangdia itu, ternyata telah cukup memberikan gambaran bahwa keinginan Foke untuk menang dalam satu putaran pada Pemilukada kali ini hanya impian belaka. Terbukti, hasil penghitungan suara secara *quick count* oleh berbagai survei, menempatkan pasangan Jokowi-Ahok meraih suara terbanyak, 42% lebih, sementara pasangan Foke-Nara hanya 32% lebih.

Hasil Pemilukada DKI Jakarta bukan hanya membuat Foke-Nara jadi terperangah, tapi juga menjungkir balikkan hasil survei berbagai lembaga survei yang dilakukan sebelum pemilukada berlangsung yang jelas-jelas mengunggulkan pasangan Foke-Nara, bahkan ramalan yang optimistis *incumbent* akan menang satu putaran.

Citra Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) misalnya, tiga bulan menjelang pemilukada merilis hasil surveinya. Hasilnya, pasangan Foke-Nara menempati urutan pertama dengan meraih 49,1% suara, dan berpotensi menang dalam satu putaran. Sementara Jokowi-Ahok menempati urutan kedua, hanya memperoleh 14,4% suara.

Lalu, kurang dari satu bulan sebelum pemilihan, LSI kembali merilis hasil surveinya, mengubah hasil survei yang disampaikan sebelumnya. Hasilnya, baik satu atau dua putaran, pasangan Foke-Nara memiliki kemungkinan terbesar memenangi Pemilukada DKI Jakarta tahun ini. Alasannya, karena tidak ada peningkatan dukungan yang signifikan didapat para kompetitor calon *incumbent*. Pasangan Foke-Nara masih diurutan pertama didukung 43,7%, sedang Jokowi-Ahok tetap didukung 14,4% suara.

Namun, kenyataan berkata lain. Segera setelah pemungutan suara di TPS (tempat pemungutan suara) ditutup, beberapa lembaga survei mengumumkan hasil *quick count* (hitungan cepat) yang hasilnya membalikkan hampir 180% hasil survei LSI tersebut. Semua lembaga survei menempatkan Jokowi-Ahok di urutan pertama dengan perolehan suara lebih dari 42%, dan memastikan pemilukada berlangsung dua putaran.

Inilah hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei. *Quick count* dilakukan Jaringan Suara Indonesia (JSI) menghasilkan: Foke-Nara meraih 34,42% suara; Hendarji-Riza 1,88%; Jokowi-Ahok 41,97%; Hidayat-Didik 11,4%; Faisal-Biem 5,15%; dan pasangan Alex-Nono 5,16%.

Sementara Prisma: Foke-Nara 34,58%; Hendarji-Riza 1,73%; Jokowi-Ahok 42,69%; Hidayat-Didik 11,57%; Faisal-Biem 4,89%; dan Alex-Nono 4,54%. Lalu Stekpi

menghasilkan: Foke-Nara 34,38%; Hendarji-Riza 1,98%; Jokowi-Ahok 40,49%; Hidayat-Didik 12,58%; Faisal-Biem 5,11%; dan Alex-Nono 5,47%.

Perhitungan nyaris sama juga dilakukan oleh LSI, yang hasilnya sebagai berikut: Foke-Nara 34,17%; Hendarji-Riza 1,82%; Jokowi-Ahok 43,04%; Hidayat-Didik 11,77%; Faisal-Biem 4,83%; dan Alex-Nono 4,37%. Sedangkan perhitungan cepat Indobarometer, menghasilkan: Foke-Nara 33,8%; Hendarji-Riza 2,6%; Jokowi-Ahok 42,2%; Hidayat-Didik 11,5%; Faisal-Biem 5,1%, sementara Alex-Nono hanya 4,7%.

Sinyal Matinya Politik Uang

Pada pagi hari pelaksanaan pencoblosan Jokowi berada di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jl. Kebagusan No. 45 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di TPS 031 Kebagusan, tempat mantan Presiden RI ini memberikan suaranya, Jokowi-Ahok menang mutlak, dengan meraih suara 190, sedang Foke hanya 92 suara.

Usai mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mencoblos -- meski hasilnya belum diketahui -- dengan modal keyakinan Jokowi langsung melakukan *manuver* (bergerak) cepat. Di tengah penghitungan *quick count* masih berlangsung, Jokowi meluncur ke Posko Hidayat-Didik di Warung Buncit, Jakarta Selatan. Cagub Jokowi dan Hidayat menggelar pertemuan tertutup sekitar 20 menit.

"Tadi pagi saya telepon Pak Hidayat. *Alhamdulillah* sudah ketemu. Agenda ini tujuannya pertama silaturahmi, kedua kami juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemilukada itu tidak panas, *wong* pemimpinnya bisa rukun seperti ini, masa yang di bawah panas," katanya usai pertemuan.

Kemenangan pasangan Jokowi – Basuki dalam putaran pertama Pemilukada DKI Jakarta berdasarkan hasil *quick count* berbagai menjungkirbalikkan hasil survei. Jokowi yang menurut survei berada di urutan kedua, melesat ke posisi pertama mengalahkan calon *incumbent* Fauzi Bowo.

OLEH BUDI SUCAHYO DAN M. BUDIONO

Hidayat menambahkan, pertemuan ini memang merupakan bagian dari silaturahmi antara dia dan Jokowi. "Maksud kunjungan ini silaturahmi saja, hal yang selalu dipentingkan. Karena politik bukanlah permusuhan," katanya. Usai pertemuan tersebut, Jokowi meninggalkan Posko Oranye milik Hidayat-Didik, ia lalu menuju Posko Jokowi-Ahok di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat.

Tidak hanya bersilaturahmi dengan pasangan Hidayat-Didik, Jokowi juga menjalin komunikasi dengan calon-calon gubernur DKI yang lain. Semuanya berhasil dihubungi, kecuali Foke. Jokowi mengaku sudah berkali-kali menghubungi Foke via telepon genggamnya, tetapi tidak diangkat.

"Semua sudah saya hubungi. Komunikasi harus berjalan terus. Silaturahmi kan baik. Semua bisa ngobrol bahkan ada yang bertemu. Tapi Pak Foke belum bisa menerima telepon saya," ujar Jokowi di Solo, Kamis 12 Juli 2012, seraya memperlihatkan rekaman panggilan keluar maupun panggilan masuk telepon genggamnya. Dalam panggilan keluar memang tertera nomor yang disimpan dengan nama-nama calon Gubernur DKI, termasuk Fauzi Bowo. "Mungkin masih sangat sibuk atau bagaimana, yang jelas saya belum berhasil berkomunikasi dengan Pak Foke," kata Jokowi.

Kemenangan Jokowi-Ahok ini, menurut Fadli Zon dalam acara dialog di sebuah stasiun televisi swasta, Senin petang (16/7), menunjukkan bahwa rakyat menginginkan perubahan. "Mudah-mudahan ini menjadi sinyal matinya politik uang, dan kesewenangan kekuasaan," ujar Fadli Zon dalam dialog itu. Dan, Fadli Zon yakin, pada putaran kedua nanti, pasangan Jokowi-Ahok akan tetap unggul alias memenangkan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 ini.

Selain itu, di mata rakyat pemilihan, Jokowi adalah sosok yang sangat bersahaja. Buktinya, seorang ibu dengan dua anak ketika berada di TPS Megawati di Kebagusan menyaksikan langsung sosok yang meraih predikat wali kota terbaik di dunia lewat depannya, dengan rasa kagum si ibu ini berkata: Sungguh sangat sederhana. Ia lalu meminta kepada kedua anaknya agar mendoakan Jokowi menang.

Mungkin, bukan hanya ibu itu saja yang mendoakan Jokowi menang, tapi sebagian penduduk DKI Jakarta yang telah bosan dengan suasana begini-begitu saja. Maka tak heran kalau Direktur Citra Komunikasi LSI Toto Zulhaq berpendapat, peluang Foke untuk menduduki kursi DKI 1 sangat berat. Karena suara yang dimiliki Jokowi tidak akan berkurang, malah cenderung akan bertambah. Pemilih memang cerdas. ◀



Suasana kampanye di Parkir Timur Senayan, Jakarta



FOTO ISTIMEWA

AGAR PEMILU Lebih Beretika

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah dibentuk. Agar penyelenggara pemilu berpegang pada etika dan kecurangan tidak lagi terjadi.

OLEH IMAN FIRDAUS

KETIKA mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati bergabung ke Partai Demokrat segera menimbulkan pertanyaan besar. Etiskah anggota penyelenggara pemilu bergabung ke partai politik pada saat sedang menjabat? Dewan Kehormatan KPU yang dipimpin Jimly Asshiddiqie pun menggelar rapat dan segera mengambil sikap: Andi Nurpati telah melanggar asas penyelenggara pemilu, ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota KPU dan ketentuan mengenai sumpah janji anggota KPU. Andi pun diberhentikan dengan tidak hormat.

Kasus Andi mencuatkan kekawatiran bahwa pelanggaran etika para penyelenggara pemilu bakal terjadi di kemudian hari. Maka dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyeleng-

gara Pemilu disebutkan ketentuan pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Presiden pada 12 Juni lalu telah melantik tujuh anggota DKPP, yaitu Ida Budhiati dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jimly Asshiddiqie, Nur Hidayat Sardini, dan Saut Hamonangan Sirait (pilihan DPR), Nelson Simanjuntak (wakil Bawaslu), Valina Singka Subekti dan Abdul Bari Azed yang ditunjuk mewakili pemerintah. Mereka ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 57/2012, untuk periode 2012-2017.

Jimly mengatakan, DKPP merupakan lembaga baru. Dan, Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki lembaga seperti ini. "Lembaga ini di luar KPU dan Bawaslu," ujar Jimly usai pemilihan anggota DKPP di DPR, awal Juni lalu, se-

raya menyatakan bahwa di banyak negara hanya punya KPU. Jadi, di samping KPU dan Bawaslu, sekarang dibentuk pula DKPP. Menurut Jimly, anggota DKPP tidak perlu membuat visi dan misi untuk melaksanakan tugasnya. Karena, dalam melaksanakan tugas-tugas di DKPP untuk panduannya cukup undang-undang.

Anggota DKPP akan bertugas memeriksa dan memutus pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu, serta jajarannya sampai tingkat bawah. Karena itu lembaga ini dianggap penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Bahkan, kata Jimly, maksud dibentuknya DKPP ini adalah untuk menegaskan bahwa sistem politik dan demokrasi yang dibangun di Indonesia ini harus didasarkan pada *rule of law* dan sekaligus *rule of ethic*. "Jadi, kualitas demokrasi kita harus kita bangun berlandaskan kepada aturan, baik hukum maupun etika. Dan saya kira, inilah sejatinya maksud dan tujuan berdirinya lembaga ini," kata mantan ketua Mahkamah

Konstitusi (MK) itu.

Harap maklum, penyelenggaraan pemilu di Indonesia seringkali diisi oleh kecurangan, bahkan pelakunya ditengarai para penyelenggara pemilu sendiri. Pemilu 2009 diberitakan banyak mengandung kecurangan, namun tidak ada yang berani mengusutnya sampai tuntas, meski banyak bukti diberikan.

Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu DPR pernah menerima laporan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2009. Sedikitnya ada 20 laporan dugaan rekayasa masif dan terencana atas kecurangan pemilu di berbagai wilayah di tanah air yang masuk ke panja. Hal itu justru disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2007-2012 Bambang Eka Cahya Widodo.

"Kami laporkan ke Panja Mafia Pemilu atas laporan kecurangan yang kami miliki. Dari berbagai aduan yang diterima Bawaslu, belum ada yang tuntas diproses karena kami sulit menemukan alat bukti dan banyak KPU daerah yang tidak bisa dimintai keterangan karena tidak kooperatif," terang Bambang.

Bambang menambahkan, sejak Panja Mafia Pemilu dibentuk pada Juni 2011, ada 11 kasus yang langsung diadukan ke Bawaslu dari beberapa daerah.

Tapi Bawaslu sulit menindaklanjuti aduan itu. KPU yang dimintai keterangan pun tidak punya data. Dokumen mereka sudah tidak jelas ada di mana. KPU daerah juga tidak mau beri keterangan karena tidak ada anggaran untuk datang ke Jakarta.

Modus-modus kecurangan pun sudah banyak diungkapkan, seperti pengelembungan suara, penipuan daftar pemilih, dan jual beli kursi legislatif di KPU. Mereka yang menawarkan kursi itu bukan KPU langsung, tapi calo yang mengaku memiliki akses ke KPU. Kasus permainan putusan Mahkamah Konstitusi dan KPU yang melibatkan calon anggota sudah terang benderang, bahkan diadukan ke kepolisian.

Tahun lalu, MK melaporkan anggota KPU Andi Nurpati ke polisi dengan tuduhan memalsukan keputusan MK untuk meloloskan caleg Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo, ke DPR RI. Padahal, surat asli MK menyebut bahwa caleg Partai Gerindra, Mestariyana Habie, yang berhak duduk di Senayan.

Adanya permainan suara itu diduga terjadi akibat berlarut-larutnya perhitungan suara yang dilakukan di setiap provinsi. Seharusnya KPU provinsi bisa lebih cepat mengumpulkan hasil pengumuman dari TPS-TPS. Tapi nyatanya, pengumuman itu berlangsung berminggu-minggu. Nah, saat menunggu pengumuman itulah banyak suara yang kemungkinan dimanipulasi.

Soal kecurangan dan pemalsuan dalam Pemilu 2009 juga diakui Koordinator Komite Pemilihan Indonesia, Jerry Sumampow. Potensi kecurangan atau pemalsuan sangat terbuka, karena adanya sistem suara terbanyak. Di samping itu banyak juga caleg yang tidak mendapat suara signifikan enggan mengawal lagi suaranya.

Walhasil, atas hasil kerja yang diperoleh oleh panja maupun Bawaslu, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu dipenuhi oleh berbagai kecurangan. Setumpuk data kecurangan itu hanya bisa diungkap bila para penyelenggara pemilu berpegang pada etika dan hukum. Dugaan kecurangan malah makin mencuat, setelah penyelenggara pemilu yang semestinya tidak berpihak, malah duduk di kepengurusan partai yang saat ini sedang berkuasa. ◀



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA

Mengucapkan belasungkawa
 yang sedalam-dalamnya atas wafatnya
BAPAK MAYJEN TNI (PURN) JOHNY WAHAB
 (Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra)

Senin, 2 Juli 2012, pukul 05.30 WIB
 Semoga arwah almarhum diterima di sisiNya dan keluarga yang
 ditinggalkan diberi ketabahan. Amin



Setelah Muliaman Terpilih

Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad terpilih jadi Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Masa peralihan dari BI dan Bapepam-LK, tidak akan mudah.

OLEH IMAN FIRDAUS

SETELAH melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di Komisi XI DPR, awal Juni lalu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad akhirnya terpilih secara aklamasi memimpin OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pemilihan ketua OJK dilakukan secara tertutup. Namun pemilihan enam anggota komisiner dilakukan secara terbuka melalui mekanisme voting tertutup.

Hasil voting menghasilkan Kepala Bapepam LK (Lembaga Keuangan) Nurhaida sebagai pengumpul suara terbanyak, yakni 54 suara. Adapun calon yang menghasilkan suara terbanyak lainnya adalah mantan Kepala Perwakilan BI New York Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono (53 suara) dan Komisiner LPS Firdaus Djaelani (53 suara). Lalu, mantan Auditor BPK Ilya Avianti (50 suara), mantan Direktur Internasional BI Nelson Tampubolon (50 suara) dan Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto (40 Suara).

"Keenam calon yang memiliki suara terbanyak terpilih sebagai anggota DK-OJK," ujar Ketua Komisi XI Emir Moeis. "Kita harapkan ini yang terbaik, mudah-mudahan

bisa berhasil. Ingat ini lembaga yang sangat strategis, penting dan besar," tambahnya.

Setelah lembaga ini terbentuk dan memiliki dewan, Muliaman berjanji akan segera melakukan tugas yaitu melakukan konsolidasi internal yang akan menentukan efektivitas lembaga ini. Memerhatikan harapan masyarakat atas lembaga di tengah kondisi global keuangan yang perlu terus dipantau, melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan lain, termasuk dengan DPR dan perlu meninjau ulang berbagai perizinan.

Nama Muliaman tidak asing di lingkungan Bank Indonesia (BI). Sebab lelaki kelahiran Bekasi, Jawa Barat, pada 3 April 1960 ini sudah bergabung dengan BI sejak 1986, sebagai staf umum di Kantor Bank Indonesia Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagian besar waktunya di Bank Indonesia digunakan untuk menekuni bidang perbankan. Selain perbankan, bidang lain yang pernah digelutinya adalah bidang perencanaan strategis dan program transformasi organisasi.

Masuk Fakultas Ekonomi UI pada 1979 mengambil jurusan Studi Pembangunan dan memperoleh



Muliaman

gelar Sarjana Ekonomi pada 1984. Ia termasuk salah seorang lulusan tercepat diangkatnya. Pada 1990 mengambil mengikuti program pendidikan S2 di John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA, dan memperoleh gelar *Master of Public Administration* pada 1991. Selanjutnya pada 1996, Muliaman mendapatkan gelar *Doctor of Philosophy* dari Faculty of Business and Economics, Monash University, Australia.

Karena kepintarannya, Muliaman dikenal sebagai Deputi Gubernur BI termuda saat ini. Di samping tugas kedinasan, beberapa pengalaman organisasi yang penting dilakoninya adalah sebagai Sekjen PP ISEI (2003-2006 dan 2006-2009), Sekretaris Dewan Penasihat *Indonesian Risk Professionals Association* (IRPA), dan Ketua Komite Evaluasi Program Pendidikan dan Latihan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Selain

itu, Muliaman saat ini juga berkarya sebagai Dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Ketua ILUNI FE 2007-2010.

Muliaman juga dikenal rajin menulis karya ilmiah yang diterbitkan di berbagai jurnal. Ia juga sering tampil sebagai pembicara di berbagai forum internasional, khususnya untuk topik kerangka regulasi finansial dan kestabilan sistem keuangan. ◀



Sadar Subagyo

SALAH satu tugas terberat Dewan Komisiner OJK adalah melakukan peralihan dari tugas-tugas yang selama ini diemban BI, Bapepam-LK ke OJK. Misalnya, mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, baik perbankan, pasar modal, juga perusahaan keuangan lain seperti perusahaan pembia-

yaan dan asuransi. Namun, masa peralihan dan transisi inilah yang dinilai paling berat. Misalnya menentukan jumlah pegawai OJK yang harus tuntas sampai September.

Karena itu, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra yang juga anggota Pansus OJK Sadar Subagyo sejak jauh-jauh hari su-

MENANTI TRANSISI

“Enam bulan pertama waktu akan habis untuk menata teknisnya...”

—SADAR SUBAGYO—

dah mengingatkan agar masa peralihan harus berlangsung dalam tempo tiga tahun. Sebab, bila dalam waktu yang terlalu singkat, justru akan membuat lembaga ini tidak bisa bekerja maksimal.

Sebab, menurut Sadar, penggabungan dua institusi bukan perkara mudah. Jadi, diperlukan waktu lebih lama untuk mempersiapkan lembaga pengawasan tersebut supaya bisa menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Sadar mengatakan, tahun pertama di masa transisi paling tidak akan digunakan untuk membuat prosedur, menata struktur, memilih komisiner. “Enam bulan pertama waktu akan habis untuk menata teknisnya,” katanya.

Tahun kedua, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) akan beres-beres melakukan penataan dengan lembaga asuransi. Bapepam dan lembaga asuransi akan lebih cepat menjalankan tugasnya karena dari awal memang sudah klop dan ketemu. “Yang jadi masalah adalah memper-

institusi ini memiliki kultur kerja yang berbeda,” ujar Sadar Subagyo.

Soal koordinasi, sebenarnya akan mudah diselesaikan jika pengawasan BI bisa masuk ke lembaga OJK. Apalagi pengawasan yang akan dilakukan OJK adalah pengawasan *risk base system* yang memerlukan pengawas yang berpengalaman minimal sepuluh tahun.

Pengalaman menunjukkan, untuk merger (penggabungan) Bank Mandiri yang terdiri atas Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim, dan Bank Pembangunan Indonesia saja diperlukan waktu lima tahun. Padahal sesama bank, jenisnya jelas. Apalagi BI dengan Kemenkeu yang terdiri dari unsur Bapepam dan sebagainya.

Meski menggabungkan dua institusi, Muliaman menyatakan, tidak akan gegabah membuat aturan. Namun beberapa hal yang menjadi perhatiannya adalah penyelarasan kultur dan cara pandang. Dengan latar belakang lembaga berbeda, kultur dan cara pandang harus disesuaikan untuk menjalankan tugas dan wewenang. ◀



Hercules Rozario Marshal

FOTO ALFIAN KARTIM

“Saya Yakin Prabowo Akan Membawa Perubahan”

JAUH hari menjelang pemilu 2014 dukungan terhadap kandidat calon presiden Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terus mengalir. Teranyar, Hercules Rozario Marshal, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), bersama anggotanya mendeklarasikan bergabung ke dalam barisan pendukung Prabowo untuk pilpres 2014.

Nama Hercules sesungguhnya sudah lama menjadi buah bibir masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kemampuannya menaklukkan kekerasan Jakarta membuat namanya makin disegani dan sekaligus ditakuti, baik oleh kawan maupun lawan-lawannya. Karena itu, ratkalah tersiar warta bahwa seorang Hercules mau terlibat dalam organisasi kemasyarakatan (ormas), tak ayal membuat banyak kalangan agak tersentak kaget.

Pertanyaan besarnya adalah mengapa seorang Hercules mau mengubah haluan hidupnya? Apakah alasan terbesarnya, sehingga ia memelopori dan memimpin berdirinya Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB)? Juga, mengapa dia begitu getol untuk mendukung pencalonan Prabowo dalam pilpres 2014?

Untuk mencari jawab atas tanya tersebut, awal Juni silam *Gema Indonesia Raya* (GIR) menyambangi Sekretariat GRIB di bilangan Kemanggisan Jakarta Barat. Dalam suasana hangat, diselingi tawa dan sesekali candaan, Hercules menjawab berbagai pertanyaan GIR dengan lancar. Berikut petikannya:

Sejauh mana perkembangan organisasi Anda, GRIB, hingga saat ini?

Dalam sembilan bulan ini sudah ada 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GRIB yang mendapatkan SK (surat keputusan). Artinya GRIB sudah resmi ada di 18 provinsi. Di samping itu ada 5 DPD yang telah mendapat mandat untuk mendirikan GRIB di sana, sehingga praktis saat ini GRIB sudah ada di 23 provinsi di Indonesia. Mudah-mudahan Oktober nanti, target kita GRIB ada di 33 provinsi di Indonesia bisa tercapai. Dengan

begitu, pada 2012 kita memiliki harapan agar GRIB sudah ada di 100% wilayah provinsi Indonesia.

Apa sih alasan terbesar bagi seorang Hercules, sehingga secara tiba-tiba mau mendirikan organisasi kemasyarakatan?

Secara pribadi saya sering bertemu dengan anggota masyarakat. Dalam pembicaraan dengan mereka saya sering mendengar harapan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Keinginan itu juga menjadi cita-cita saya sejak lama. Intinya, saya dan juga banyak anggota masyarakat yang lain mengharap ada perubahan dalam bidang keadilan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan juga yang lainnya.

Setelah bertemu dan berdiskusi dengan berbagai tokoh masyarakat, termasuk juga ulama saya menyimpulkan, mereka sebagai warga negara sangat mengharapkan adanya perubahan, serta ada jaminan hidup dan kesejahteraan.

Apa yang mendorong hingga Anda memilih mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden?

Secara pribadi saya banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Pak Prabowo. Dalam kapasitas saya sebagai ketua GRIB melihat bahwa perubahan itu bisa didapatkan bila negara ini berada di bawah kepemimpinan figur seorang Prabowo Subianto. Beliau orang yang cocok menggantikan kepemimpinan SBY setelah masa jabatannya habis.

Jadi sejak dini kami merasa sosok Pak Prabowo ini harus didukung, karena beliau pantas menggantikan Pak SBY pada pilpres 2014 nanti. Disitulah saya merasa terpanggil untuk mendirikan GRIB, dan mendukung rencana pencalonan Prabowo pada 2014 nanti.

Jadi Anda siap mendukung dan berharap Prabowo bisa terpilih jadi Presiden

pada 2014?

Insya Allah, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjadi pemimpin kita. Pemimpin yang bersih, berani dan tegas. Saya yakin itu ada pada diri Prabowo, dan beliau orang yang kita cari. Dia berani pasti karena bersih, beliau juga tegas karena pasti bersih.

Saya juga yakin, Pak Prabowo bikin partai itu hanya karena terpanggil saja. Beliau memiliki pikiran berjuang bukan karena uang, tapi karena terpanggil untuk mempertahankan merah putih. Sekarang ini kita prihatin, korupsi terjadi di mana-mana, perampokan dan pencurian terdengar biasa saja. Jadi, satu-satunya obat yang harus diminum bangsa Indonesia adalah memilih pemimpin yang bersih, berani, tegas, jujur. Dan itu ada pada Pak Prabowo.

Bagaimana Anda meletakkan posisi GRIB dengan sayap partai Gerindra yang sudah ada selama ini?

Kami ini organisasi kemasyarakatan, organisasi ini bekerja untuk men-support partai Gerindra dalam mencapai target partainya. Terutama, meloloskan Pak Prabowo menjadi capres dan memenangkannya pada 2014. Untuk itulah kami ada dan bekerja. Kami tidak sama dengan partai. Kalau di partai, mereka berjuang untuk menjadi caleg, sementara GRIB tidak. GRIB harus bekerja sebagai amal. Berjuang sepenuhnya untuk masyarakat.

Jadi kalau Prabowo tidak mencalonkan diri pada Pilpres 2014, kemungkinan GRIB juga tidak lahir?

Saya yakin dia pasti maju mencalonkan diri, makanya saya dirikan organisasi ini untuk men-support Partai Gerindra. Kalau tidak, saya tidak mau pimpin organisasi ini, saya ingin jadi orang biasa saja.

Kalau Prabowo nantinya sudah jadi Presiden apakah GRIB tetap berdiri, karena misinya sudah tercapai?

Kalau itu benar-benar terjadi dan Prabowo jadi presiden, selanjutnya untuk memutuskan masa depan GRIB bukan hanya saya sendiri. Saya kembalikan kepada ketua-ketua DPD GRIB, apakah akan berubah menjadi partai politik, atau tetap menjadi organisasi kemasyarakatan.

Ada kemungkinan GRIB berubah menjadi partai politik?

Kalau itu masalah itu ditanyakan sekarang, maka saya jawab tidak. Kita akan tetap dukung partai Gerindra, seperti halnya organisasi sayap partai.

Bagaimana keterlibatan GRIB dalam Pemilihan Jakarta Juli nanti?

Sebagai organisasi yang mendukung Partai Gerindra, kita juga akan men-support kandidat yang dijagokan oleh partai. Tapi bagaimana bentuk bantuan dan keterlibatan GRIB dalam pemilukada, kami tengah merumuskannya dengan seluruh elemen yang terkait. Utamanya, kami menunggu masukan dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Sekarang ini bermunculan ormas yang kelahirannya merisaukan masyarakat, bagaimana dengan GRIB?

GRIB dipastikan lain dari teman-teman yang suka menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. GRIB akan lebih banyak bicara soal perubahan menuju kesejahteraan masyarakat. Riilnya, berbuat baik kepada masyarakat, membantu sesama masyarakat yang membutuhkan.

Contohnya, GRIB melakukan baksos (bakti sosial) untuk membantu korban kebakaran Tambora, Pasar Baru, Pademangan. Baksos untuk kaum dhuafa dan anak yatim piatu, termasuk yang ada di sekitar kantor ini. GRIB itu jelas tujuannya, yaitu membantu masyarakat. ◀



FOTO ALFIAN KARTIM

PP TIDAR

Bila Pemilu Diadakan Sekarang, Prabowo Menang

BILA pemilihan presiden dilakukan sekarang, niscaya kandidat capres dari Partai Gerindra akan menjadi pemenang. Namun visi misi dan kepemimpinan Prabowo tidak akan berjalan mudah. Pasalnya kemenangan Prabowo pada pilpres tidak diikuti oleh kemenangan Gerindra pada pemilihan legislatif. Gerindra tidak bisa menguasai parlemen. Karena elektabilitasnya berada di bawah Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

Karena itu, disisa waktu yang masih ada seluruh mesin partai harus bisa bekerja lebih keras. Mencoba mendekati dan mengajak masyarakat untuk memilih Gerindra. Pernyataan

itu disampaikan Ari Nurcahyo, peneliti Soengeng Sarjadi Syndicate (SSS) pada acara diskusi Rabu (13/6) malam yang dilaksanakan Pimpinan Pusat (PP) Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di sekretariatnya Jl. Woltermonginsidi Jakarta Selatan.

Seperti diketahui pada Rabu (6/6), SSS merilis hasil survei terkait kandidat calon Presiden 2014. Hasilnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan figur capres pada 2014 yang memiliki elektabilitas tertinggi, mencapai 25,28%. Di bawahnya ada Megawati Soekarnoputri (22,4%), Jusuf Kalla (14,9%), Aburizal Bakrie (10,6%), dan

Surya Paloh (5,2%). Selain itu ada juga nama Wiranto, Sultan HB X, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, Hidayat Nur Wahid, Ani Yudhoyono, Akbar Tanjung, Djoko Suyanto serta Pramono Edhi Wibowo.

Namun, kemenangan yang diraih Prabowo berdasarkan penelitian itu, menurut Herdy Syahtazad, peneliti PSIK dan dosen Paramadina, bisa lenyap seandainya pilpres yang jurdil gagal dilaksanakan. Karena itu, pemilu harus dipastikan bisa berjalan jujur. Seluruh komponen bangsa harus membumisasikan pemilu yang *fair*. Apalagi, orang yang ingin menjatuhkan Prabowo juga tidak kecil jumlahnya.

Widiyanto Saputro, Ketua Bidang Informasi Strategis DPP Partai Gerindra mengungkapkan kenyataan bahwa reformasi gagal melahirkan pimpinan nasional yang masih berusia muda. Berbeda dengan era Bung Karno dan Soeharto yang saat itu masih berusia di bawah lima puluh tahun. Berdasarkan survei itu pula, Widiyanto mengakui, kecilnya elektabilitas Partai Gerindra. Apalagi, saat ini Gerindra masih terus melakukan penguatan di bawah.

Pelaksanaan pemilu 2014, menurut Widiyanto, masih menyisakan sejumlah kekhawatiran. Terutama soal kualitas pendidikan pemilih yang akan berimbas pada terbatasnya kemampuan menganalisa para calon. Berdasarkan penelitian didapat hasil bahwa calon pemilih yang berpendidikan sekolah dasar mencapai 37,8%, SMP 19,2% dan SMA sebesar 13%. Artinya lebih dari 50% pemilih tidak bisa menganalisa dengan baik, para calon pemimpinnya. Mereka juga rentan terhadap praktik *money politic*. Apalagi jumlah masyarakat yang tidak tersentuh media massa, baik cetak maupun elektronik, masih sangat tinggi. Terbukti, di Jakarta saja, ada 27% warga masyarakat yang tidak bersentuhan dengan media masa.

Jadi hasil survei itu memang sedikit melegakan. Namun tantangan kita, menurut Widiyanto, untuk memenangkan Gerindra dan Prabowo benar-benar masih membutuhkan kerja keras. Karena itu dalam sisa waktu yang ada mesin politik Gerindra harus bekerja keras. Kita jangan sampai gagal mendapat dukungan besar dari seluruh masyarakat. "Kalau gagal, maka yang akan diperoleh hanyalah tujuan antara, yaitu mengantar Prabowo menjadi presiden. Sementara cita-cita besar mewujudkan Indonesia Raya akan menemui hambatan," katanya. ◀ **MBO**

PP TIDAR

Perayaan 51 Tahun Jokowi



FOTO ALFIAN KARTIM

LANTUNAN lagu diiringi musik akustik menjadi salah satu penanda penyambutan anak muda Jakarta yang tergabung dalam Tunas Indonesia Raya (TIDAR) saat calon Gubernur DKI Jakarta Jokowi menyambangi kantor TIDAR, di bilangan Wolter Monginsidi, Jumat (22/6). Akibatnya jalanan di sekitar kantor TIDAR pun semakin semrawut dan mengalami kemacetan parah. Apalagi ratusan sepeda onthel dan puluhan vespa kuno turut menyemarakkan peristiwa itu.

Beruntung keberadaan Jokowi di tempat itu tidak terlalu lama. Dia hanya berkesempatan menyapa anggota TIDAR tak lebih dari 15 menit. Di sana Jokowi bercerita, kalau dirinya tidak pernah melakukan perayaan ulang tahun. Jadilah ulang tahun Jokowi ke-51 yang dirayakan TIDAR, dan itu menjadi pe-

rayaan ulang tahun pertama kali dialami Wali Kota Solo tersebut.

Pada kesempatan yang singkat itu Jokowi meyakinkan bahwa anak muda Jakarta memang membutuhkan ruang terbuka untuk menyalurkan ekspresinya. Karena itu, pemerintah wajib menyediakan sarana terbuka tersebut. Sekalipun bila terpaksa harus membeli tanah untuk penyediaan ruang terbuka, itu akan dilakukannya bila terpilih menjadi gubernur Jakarta nanti.

Sejumlah musisi muda turut menunjukkan *performance*-nya dalam meramaikan kedatangan Jokowi. Mereka adalah relawan musisi, mahasiswa, komunitas anak muda dan pecinta musik Indonesia. Antara lain Magic Seaweed, Humel, E-min dan Jack Nugraha.

◀ **MBO**



FOTO DOK. PC KESIRA BEKASI

PC KESIRA BEKASI

Bantu Korban Sukhoi

DIANTARA duka nestapa keluarga korban jatuhnya pesawat Sukhoi Super Jet 100 beberapa waktu lalu, terdapat secuil cerita dan kebanggaan kader Gerindra karena ikut berpartisipasi dalam evakuasi korban musibah itu. Kebanggaan itu dirasakan oleh Drs. H. Andono J. Warih dan Yusron Azya, yang keduanya merupakan kader Gerindra di wilayah Bekasi.

Ceritanya, pada Kamis (10/5), saat tersiar kabar penemuan titik lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi, Andono dan Yusron berinisiatif ikut menjadi relawan dalam evakuasi korban musibah tersebut. Saat itu juga keduanya berangkat ke lapangan terbang Halim Perdana Kusuma membawa ambulans Kesira Bekasi.

Rupanya keinginan menolong itu tidak dengan mudah bisa dilaksanakan. Kedua kader Gerindra itu harus melewati persyaratan yang sangat *njlimet*, dan harus melapor ke berbagai pihak. Mulai dari Kepolisian, Bea Cukai, Angkasa Pura, dan juga Basarnas. Berkat kesabaran dan kerja keras, akhirnya mereka memperoleh izin yang diharapkan. Mulai

saat mobil ambulans Kesira Gerindra menjadi satu-satunya ambulans dari parpol yang turut serta dalam aksi evakuasi korban. Selebihnya merupakan ambulans PMI, Depkes, Dinas Pemakaman, TNI AU, dan Polri.

Setelah menunggu selama dua hari penuh, akhirnya tepat pada Minggu (13/5) ambulans Kesira Gerindra berkesempatan membawa satu kantong jenazah dari Halim menuju ke RS Polri. Yang mengharukan, disepanjang perjalanan mereka dielu-elukan dengan teriakan Prabowo Gerindra, hingga masuk ke pelataran rumah sakit. Bahkan ketika berada dalam kawasan rumah sakit beberapa awak media juga terdengar memberikan puja-puji serupa.

Dan setelah semua jenazah teridentifikasi, atau berhari-hari sejak kecelakaan terjadi ambulans Kesira kembali berkesempatan membawa korban kecelakaan Sukhoi. Kali ini yang dibawa adalah peti jenazah warga Rusia Alexey N. Kirkin dari Halim dibawa kembali ke RS Polri untuk disimpan di kontainer pendingin, menunggu jadwal pemulangan. ◀ **MBO**

PIRA Sultra Gelar Revolusi Putih



FOTO ALFIAN KARTIM

PIMPINAN Daerah Perempuan Indonesia Raya (PD PIRA) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus melaksanakan Program Revolusi Putih, yakni pemberian susu segar gratis kepada anak-anak Indonesia usia sekolah secara berkala pada setiap bulan, sebagai program berkesinambungan dari DPP Partai Gerindra. Pada 19 Juni 2012, PD PIRA Sultra menggelar kegiatan Revolusi Putih untuk murid-murid SD Negeri 1 Langgea Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan.

Hj. Poppy Manuhutu, Ketua PD PIRA Sultra mengatakan, pihaknya memang telah mencanangkan Program Revolusi Putih yang bertujuan untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan tambahan gizi kepada anak-anak Indonesia dengan cara minum susu segar. Selain itu, program ini juga untuk membudayakan kepada seluruh komponen bangsa, khususnya para orang tua dari anak-anak Indonesia, akan pentingnya minum susu segar buat putra-putri mereka.

Menurut Poppy, minum susu penting, karena anak-anak sebagai aset dan penerus

bangsa ini yang nantinya akan mempunyai jati diri sebagai bangsa Indonesia, selain akan memiliki kemampuan yang prima dan mampu bersaing dengan dunia luar, yang pada akhirnya mereka dapat menumbuhkan cinta akan tanah airnya serta mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi.

Revolusi Putih merupakan kegiatan rutin yang dilakukan PD PIRA Sultra. Selain itu, PD PIRA Sultra juga pernah menggelar seminar kesehatan dan kecantikan, yang merupakan rangkaian acara penguatan PD PIRA Sultra. Selain itu, PD PIRA Sultra juga melakukan kunjungan ke panti asuhan, dan berbagai kegiatan lainnya.

Pada 26 Juni 2012, PD PIRA Sultra melakukan pelantikan dan penguatan Pengurus Cabang (PC) PIRA seluruh Sultra, sekaligus temu kader serta kuliah umum bertempat di Universitas Laki Dende di Unaha. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Pengurus Pusat (PP) PIRA Soemarjati Arjoso, sekaligus melantik pengurus PIRA Sultra. ◀ AGT

DPC GERINDRA BLORA

Gerindra Siap Kuasai Blora

AKHIR Mei, tepatnya Sabtu (26/5), beberapa jalan protokol di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terasa hingar bingar. Ratusan siswa SMA se-Kabupaten Blora merayakan kelulusan mereka, sembari mengibarkan bendera Partai Gerindra. Ulah mereka ini sempat menarik perhatian masyarakat. Beruntung perayaan kelulusan itu berjalan lancar, tanpa menimbulkan keributan.

Kemeriahan perayaan lulusan itu sebenarnya menimbulkan sedikit rasa was-was di kalangan pengurus DPC Gerindra Blora. Pasalnya, pada saat bersamaan tengah berlangsung acara konsolidasi partai, antara DPD Gerindra Jawa Tengah dengan DPC Kabupaten Blora. Acara tersebut berlangsung di RM Resto De'Joglo Blora. Tema yang dipakai dalam acara tersebut adalah "Struktural Kuat Merupakan Modal Kemenangan Partai Gerindra Dalam Pemilu 2014."

Hadir dalam kesempatan tersebut, ketua dan jajaran pengurus DPD Gerindra Jateng, dan seluruh pengurus DPC Gerindra Kabupaten Blora. Juga hadir seluruh jajaran ketua, sekretaris dan bendahara 16 PAC Gerindra se-Kabupaten Blora, serta pengurus organisasi sayap partai yang sudah terbentuk, seperti PC PIRA, PC Satria, PC Gemira, PC KIRA, PC Kesira dan PC Laskar Diponegoro. Acara terasa semakin meriah berkat kehadiran pengurus Paguyuban Kepala Desa

(PRAJA) Kabupaten Blora. Pada kesempatan itu Praja Kabupaten Blora menyatakan dukungan pada partai, dan siap berjuang memenangkan Gerindra pada pemilu mendatang.

Pada kesempatan itu, DPC Blora menyatakan kesiapannya untuk memenangkan dua kursi di tiap daerah pemilihan. Karena itu, sejak dini mereka sudah melakukan penjangkaran, agar caleg yang maju adalah calon yang mumpuni. Yaitu, mereka yang memiliki basis masa yang kuat, dan mempunyai integritas serta kapasitas sebagai anggota DPR.

H. Abdul Wachid, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah melihat langsung kesiapan struktural DPC Blora ini. Ini penting, karena kesiapan struktural merupakan salah satu modal bagi kemenangan Gerindra. Menurut Wachid, pihaknya serius dalam melakukan verifikasi kesiapan struktural di daerah. Karena itu, DPD Gerindra Jawa Tengah secara marathon berkeliling kesemua kabupaten/kota untuk melihat secara langsung kondisi Gerindra di bawah.

"Disela-sela itu kami melakukan sosialisasi UU Pemilu, karena ini juga penting buat masa depan partai. Kami juga meminta agar pengurus DPC berbuat bijak menyikapi sistem terbuka pada pileg nanti. Jangan sampai ada pertikaian diantara kader sendiri", kata Wachid menambahkan. ◀ MBO



PD GEMA SADHANA LAMPUNG

FOTO DOK. GEMA SADHANA LAMPUNG

Temu Kenal Gema Sadhana Lampung

SETELAH enam bulan sejak mendapat mandat menyusun kepengurusan Pimpinan Daerah, PD Gema Sadhana Lampung akhirnya terbentuk. Rencananya, pelantikan atas kepengurusan PD Gema Sadhana Lampung, dan PC Gema Sadhana se-Provinsi Lampung diselenggarakan pada 7 Juli ini. Rencana tersebut disampaikan PD Gema Sadhana kepada DPD Gerindra Lampung.

Pertemuan yang dikemas dalam acara silaturahmi PD Gema Sadhana periode 2011-2014 dengan DPD Gerindra Lampung itu berlangsung di Sekretariat DPD Gerindra Jl. Durian Payung, Bandar Lampung, Sabtu (19/5). Pertemuan juga dimanfaatkan untuk saling mengenal lebih dekat diantara sesama pengurus. Juga menyamakan persepsi, antara organisasi sayap dengan induknya.

Pada pertemuan tersebut hadir Ketua DPD Gerindra Lampung H. Gunadi Ibrahim beserta jajarannya. Juga hadir, Ketua PD Gema Sadhana Provinsi Lampung I Made Suarjaya, Sekretaris PD Gema Sadhana I Wayan Aryudi, beserta pengurus dan sejumlah PC Gema Sadhana Provinsi Lampung.

Pada kesempatan itu, I Made Suarjaya menegaskan kesiapannya mendukung penuh perjuangan Gerindra. Baik untuk memenangkan pemilu legislatif maupun pemilu presiden pada 2014. Untuk itu pihaknya terus melakukan percepatan dalam membentuk Pimpinan Cabang Gema Sadhana. Diharapkan, dalam waktu dekat seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 14 sudah memiliki PC Gema Sadhana. Saat ini PC Gema Sadhana baru terbentuk di 9 kabupaten/kota. ◀ MBO



DPC GERINDRA KOTA SERANG

FOTO DOK. DPC GERINDRA KOTA SERANG

Bakti Gerindra Untuk Rakyat Serang

SEJAK berdiri pada 2008, keberadaan dan kerja keras Partai Gerindra terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu bentuk kerja keras Gerindra itu bisa dinikmati masyarakat di kawasan Penancangan Kota Serang, Banten, pada Rabu (20/6). Saat itu dihelat acara bakti sosial bertajuk, "Ketahanan Pangan, Kesehatan Ibu dan Anak," serta Gerakan Penanggulangan Gizi Buruk. Acara yang diselenggarakan bersama oleh DPC Gerindra Kota Serang, PP PIRA dan PP Kesira tersebut bertempat di lapangan bola mini Penancangan Kota Serang, Banten.

Pada acara itu dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain: pelayanan kesehatan gratis oleh Kesira. Revolusi Putih, pembagian sembako dan makanan tambahan pendamping ASI. Lalu, pembagian 500 bibit singkong emas dan 20 pohon sawo serta jambu. Juga bazar makanan dan hasil kerajinan khas Kota Serang. Selain itu, ada pula pentas kesenian Debus Banten.

Acara tersebut dihadiri oleh Prof. DR. Suhardi M.Sc., Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Tanya Alwi Penasihat PIRA, Jasmin Setiawan, Ketua I PP PIRA dan Budi Heri-

yadi SE, SH., Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten. Tampak pula pengurus PP PIRA, PP Kesira, PP KIRA, Gemira, dan Pindra Banten, seluruh Ketua DPC Gerindra se-Provinsi Banten, seluruh Ketua PAC se-Kota Serang, PIRA Bandung dan Cianjur, serta Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian setempat, dan Camat Kota Serang.

Kegiatan tersebut diadakan untuk membangun kemitraan multi pihak, antara partai politik, masyarakat dan pemerintah. Menjalinkan kemesraan yang lebih baik antara Partai Gerindra dengan seluruh organisasi sayap. Juga membangun kemandirian kesehatan ibu dan anak. Dan membangun kesadaran bersama antara masyarakat yang kurang beruntung dengan yang mempunyai keberuntungan rezeki.

Menurut Ketua Panitia, Encop Sofia, MA, acara ini merupakan program Gerindra untuk rakyat. Terutama dalam upaya mendampingi masyarakat agar memiliki ketahanan pangan. Karena Gerindra juga berkepentingan untuk memastikan bahwa hak dasar rakyat dalam bidang kesehatan dan ekonomi bisa terpenuhi. ◀ MBO

KUE BARUASA

Pembawa Berkah

Dari sekedar coba-coba menjual Baruasa, kue khas Kendari, akhirnya pasangan suami istri Tagala dan Marhana kini bisa memperbesar usahanya dengan omzet sekitar Rp 124 juta sebulan.

OLEH AGUSTAMAN

BAU HARUM kelapa yang disangrai sudah tercium begitu memasuki pintu pabrik UD Membiri di kawasan Lorong Danggar, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Keharuman bau khas kue makin semerbak ketika memasuki kawasan pabrik seluas 18 x 21 meter persegi tersebut. Di dalam pabrik, beberapa perempuan berseragam, lengkap dengan tutup kepala dan tutup mulut, terlihat sibuk membolak-balik parutan kelapa di wajan ukuran besar, yang ditaruh di atas sebuah kompor berbahan bakar minyak tanah. Sementara di sudut lain, beberapa pekerja sedang mengaduk adonan tepung beras. Ada pula yang membuat bulatan-bula-



FOTO-FOTO ALFIAN KARTIM



Menyangrai kelapa parut



Marhana dan Tagala, produsen kue Baruasa

tan dari adonan tepung yang sudah dicampur dengan gula dan kelapa sangrai, menghiasinya dengan wijen dan kacang mete, lalu dimasukkan ke dalam oven.

Begitulah kesibukan sehari-hari di pabrik kue Baruasa milik pasangan suami istri Tagala dan Marha-

na. Sudah sejak 2002 silam, Tagala dan istri berkuat dengan pembuatan kue kering khas Kendari. Kue Baruasa ini sekarang menjadi salah satu oleh-oleh khas Kendari, selain kue Bagea dan kacang mete. Padahal, pembuatan kue tersebut awalnya hanyalah usaha coba-coba

yang dilakukan oleh Marhana, lalu dipasarkan oleh sang suami, Tagala.

Tagala mengawali ceritanya, kehidupan mereka dulu serba kekurangan. Sebagai sopir angkutan trans Sulawesi, hasil jerih payahnya tak selalu bisa menutupi kebutuhan hidup keluarga. "Suatu hari, ketika kendaraan saya berhenti di Rate Rate, saya beli 10 bungkus keripik pisang yang dijajakan pedagang di sana. Lalu saya titip jual ke toko swalayan Sinar Alfa di Kendari. Tak disangka, 2 hari saja keripik pisang itu habis terjual. Dari situ pesanan terus bertambah sampai 100 bungkus sekali taruh," kisah pria kelahiran Bone, 29 Juli 1962, ini kepada tabloid *Gema Indonesia Raya*.

Rupanya pemilik toko tak puas jika Tagala hanya menaruh keripik pisang. Kepada Tagala, pemilik toko menanyakan apakah istri Tagala bisa membuat kue kering yang bisa dijajakan di toko swalayan tersebut? Ia teringat bahwa istrinya pernah membuat kue khas Buton dan Bugis, maka Tagala pun menyanggupi tawaran tersebut.

Sejak itu ia mulai membuat kue Baruasa. Sebelum kue ditaruh di toko, Marhana dan Tagala menawarkan kue buatannya ke para tetangga rumah. "Mereka bilang, (kue) ini sudah cocok dijual," kata Tagala. Dari situlah, Tagala dan istri yakin, usaha yang mereka rintis bakal sukses. "Semula, kami taruh beberapa bungkus kue isi 12 seharga Rp 4.000 per bungkus di swalayan Sinar Alfa. Tadinya pakai bungkus plastik, terus ganti pakai toples. Kue kami ternyata laku terjual," terang Tagala yang juga memasarkan kue keringnya ke kios-kios kecil di seki-

tar rumah kontrakkannya di Membiri, Puuwatu, Kota Kendari.

Perlahan, pesanan kue makin meningkat. Hasil uang yang didapat diputar untuk memperbesar usaha. "Semuanya masih saya kerjakan sendiri. Suami yang bertugas mengantarkan ke toko dan kios langganan karena dia masih jadi sopir," ujar Marhana.

Namun yang namanya usaha tak selalu berjalan mulus. Usaha kue Baruasa milik Tagala dan Marhana sempat berhenti karena ketakutan mereka tak punya izin usaha. "Waktu itu pemilik swalayan bilang, saya harus melengkapi usahanya dari Badan POM. Saya takut, apalagi waktu itu saya pikir Badan POM itu polisi. Makanya, kami sempat stop usaha. Modal kerja akhirnya habis untuk menutupi kebutuhan hidup," kata Tagala dengan mata berkaca-kaca.

Beruntung, seorang tetangga rumah yang kebetulan anggota dewan, H. Rahim, berbaik hati memberi modal gratis Rp 4 juta untuk melanjutkan usaha.

Penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional 2006 di Kota Kendari nampaknya menjadi awal kesuksesan usaha suami istri ini. Para peserta dan tamu MTQ banyak yang mencari oleh-oleh khas Kendari, termasuk kue Baruasa. Karyawan yang tadinya hanya satu orang, kemudian ditambah jumlahnya. Mereka para ibu rumah tangga di sekitar rumah kontrakan Tagala.

Saat ini, karyawan UD Membiri sudah mencapai 25 orang. Mereka bisa memproduksi 400-500 bungkus kemasan kecil dan besar, terdiri dari isi 12, 24 dan 56 kue dengan harga mulai dari Rp 4.000

hingga Rp 28 ribu/bungkus. Usaha yang tadinya dikerjakan di rumah kontrakan, kini bisa dikerjakan di pabrik yang terbilang bagus untuk ukuran usaha UMKM.

"Kini, dalam satu minggu bisa habis 6 karung tepung beras, 2.000 butir kelapa, dan telur 1.050 butir per hari," papar Tagala yang kini sudah memiliki satu armada mobil boks untuk mengantarkan kue ke seantero Kendari, bahkan sampai Makassar dan Palu. "Saya baru saja buka cabang di Palu, kerjasama dengan keponakan saya," sambung bapak dua anak ini.

Kesuksesan usaha ini tentunya tak lepas dari bantuan perbankan. UD Membiri adalah mitra binaan PT Bank Muamalat Cabang Kendari. Sebagai mitra binaan, UD Membiri dapat bantuan pinjaman modal kerja dari Bank Muamalat tersebut.

"Sudah dua kali saya dapat bantuan modal usaha. Pertama kali dapat bantuan Rp 21 juta, *Alhamdulillah* sudah lunas. Kedua kalinya memperoleh Rp 300 juta yang digunakan untuk pembuatan pabrik dan peralatan tambahan," jelas Tagala yang usahanya pernah masuk daftar nominasi perusahaan penerima Paramakarya tahun 2011.

Tagala tampaknya belum puas dengan usahanya yang kini beromzet rata-rata Rp 124 juta setiap bulan. Ia berharap agar usahanya bisa berlanjut dan makin membesar. "Anak bungsu saya memutuskan berhenti kuliah ilmu komputer karena mau membantu usaha bapak-ibunya. Maklumlah, kami ini tak pandai pembukuan, apalagi komputer. Biarlah dia yang jadi penerus kami karena kakaknya lebih senang jadi perawat," tandas Tagala. ◀



FOTO-FOTO ALFIAN KARTIM

Pesona Fuya dari LEMBAH BADA

Kain yang terbuat dari kulit kayu yang sudah hadir sejak 3500-4000 tahun silam, dianggap penghubung Tuhan dan manusia. Perlu pelestarian ekologis dan pewarisan keterampilan.

OLEH IMAN FIRDAUS

USIANYA sudah menginjak 72 tahun. Kerutan di wajah dan rambut putih jelas terlihat. Namun sorot mata, pendengaran, bahkan kecekatan dalam membuat kulit kayu menjadi bahan pakaian memperlihatkan semangat yang tak pernah padam. Sofi, perempuan dari Lembah Bada, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, itu tak lain adalah salah seorang pembuat Fuya – sebuah karya kerajinan yang tak ternilai, merupakan warisan leluhurnya – yang kini makin langka.

Fuya adalah kain atau sarung yang bahan dasarnya kulit kayu *Paper Mulberry* atau dalam bahasa setempat dinamakan Bea, Ivo atau Saeh. Cara membuatnya, kulit kayu tersebut dikelupas dari batangnya, kemudian dilebarkan dengan cara memukul berkali-kali menggunakan alat pemukul dari batu. Sembari dipukul kulit kayu itu dibasahi agar lembek. Setelah lebar sesuai yang diinginkan, kemudian disiram air lalu dibungkus daun pisang. Sel lembar Fuya bisa dihasilkan dalam tempo satu hari. Setelah dikeringkan kemudian diberi motif dan warna yang bahannya diambil dari pewarna alami.

Meski terkesan mudah rusak, namun Fuya cukup awet. “Kain yang saya gunakan ini sudah 20 tahun usianya,” kata Sofi sambil menunjuk kain coklat yang dia gunakan. Selain ada yang digunakan untuk pakaian sehari-hari, Fuya juga dikenakan untuk upacara adat.

Seluruh bahan alami terdapat di kawasan lembah yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Namun, kawasan ini sangat terpencil. Untuk mencapai Lembah Bada, tempat Sofi tinggal, butuh waktu delapan jam perjalanan dari kota terdekat, Poso. Kendaraan yang digunakan pun berganti-ganti, lima jam mengendarai kuda dan tiga jam berikutnya menggunakan ojek.

Tidak heran bila hasil kerajinan (Fuya) dari masyarakat Lembah Bada ini merupakan salah satu warisan dunia. Sebab, menurut peneliti kertas dari Jepang, Isamu Sakamoto, Fuya adalah keterampilan yang sudah dilakoni sejak 3500 sampai 4000 tahun silam, atau sejak zaman batu muda. “Fuya seperti situs yang hidup,” ujar Sakamoto. Dan pembuatan kain atau kertas dari kulit kayu ini, menurut Sakamoto, sudah jarang ditemukan lagi di dunia ini, selain di Indonesia.

Keunikan Fuya bisa menghasilkan bayangan motif (*watermark*) di permukaan kertas. Hal ini disebabkan alat pemukulnya yang terbuat dari batu terdapat motif bergaris. Padahal dalam sejarah pakaian, bayangan motif biasanya dihasilkan dengan cara dilukis, dicetak atau disulam, jadi bayangan motifnya terlihat langsung. Namun dengan bayangan motif dalam Fuya memberi bukti bahwa zaman batu pun sudah dikenal motif yang bisa menghasilkan bayangan, seperti dikenal pada masa sekarang.

Bukan hanya itu, teknik pembuatan kain ini pun mampu menghasilkan warna putih dengan teknik yang sangat tinggi. Kain putih dihasilkan dari pohon terpilih. Pada zaman dulu, kulit pohon yang menghasilkan warna putih sangat terbatas. Kebanyakan menghasilkan warna coklat seperti dari pohon beringin yang tumbuh di beberapa tempat.

“Kain berwarna coklat atau krem yang biasa digunakan di Indonesia, untuk kebutuhan sehari-hari dan dari kalangan biasa,” ujar Sakamoto. Namun Fuya yang berwarna putih memiliki makna khusus, yakni sebagai penghubung manusia dan Tuhan. Karena itu, di kalangan masyarakat Lembah Bada, ada syair berbunyi: *Tuhan mengirim Fuya yang putih, sebagai penghubung antara Tuhan dan manusia.*

Sayangnya, Fuya saat ini hanya bisa dipesan melalui nenek-nenek yang sudah renta, seperti Sofi. Generasi yang lebih muda di sana tidak bisa menghasilkan Fuya berkualitas tinggi. Hal ini dikhawatirkan akan memutus generasi pembuat Fuya yang berkualitas.

Sementara Endang S. Thohari, Ketua Harian PIRA (Perempuan Indonesia Raya) yang hadir sebagai pembahas meminta kepada pemerintah agar melakukan langkah per-

lindungan terhadap Fuya dengan cara melakukan analisa sosial budaya (*socio cultural*). “Fuya adalah ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal,” katanya.

Karena menggunakan bahan dasar kayu, maka perlu adanya inventarisasi dan identifikasi kayu dalam usia berapa saja yang boleh ditebang. Hal ini untuk tetap menjaga kelestarian alam dan ketersediaan kayu tersebut bagi masyarakat setempat. Apalagi kawasan Lembah Bada yang masuk dalam Taman Nasional Lore Lindu, yang merupakan hamparan rumput yang luas, wajib dilindungi.

Di kawasan ini, selain hidup masyarakat pembuat Fuya juga situs megalitikum berupa patung batu berukuran raksasa yang hanya ditemukan di sana dan Amerika Latin. Maka, pelestarian Fuya sama artinya dengan upaya melestarikan lingkungan hidup.

Pendekatan sosial budaya dan lingkungan menjadi sangat penting, justru agar tidak dirusak oleh kepentingan asing yang hanya memanfaatkan masyarakat demi urusan ekonomi semata. Ekonomi kerakyatan yang dikembangkan dalam pembuatan Fuya oleh masyarakat di Lembah Bada harus dilestarikan, sekaligus melestarikan lingkungan yang selama ini memberi hidup bagi masyarakat di sana. ◀



Seminar Pesona Budaya Fuya



Pameran kain tradisional Sulawesi Tengah



Pameran lukisan kain Fuya

Perangkat Desa Harus Jadi PNS



FOTO ISTIMEWA

PERANGKAT desa menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan. Tenaga dan pikiran mereka besar sumbangannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebab, sebagian besar rakyat Indonesia berdomisili di desa. Tidak heran bila desakan agar RUU tentang Desa segera disahkan semakin menguat, terutama dari para kepala desa.

Fraksi Partai Gerindra sangat mendukung RUU ini. Sebab, selama ini desa tidak memiliki payung hukum yang jelas. Lebih dari itu, Fraksi Gerindra mengusulkan agar perangkat desa bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Saat pemerintah akan memberikan gaji ke-13 kepada para PNS, Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi. Namun, langkah ini sejatinya diikuti dengan perubahan status

perangkat desa. "Kami apresiasi kebijakan pemerintah meneruskan gaji ke-13. Tapi di sisi lain ada ketimpangan antara sesama aparatur negara. Perangkat desa sejatinya adalah ujung tombak pembangunan negara, namun mereka nasibnya tak seperti PNS," kata juru bicara Fraksi Gerindra Sadar Subagyo dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda Pandangan Fraksi-fraksi atas Keterangan Pemerintah Mengenai Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 di Kompleks Parlemen, Jakarta, akhir Mei lalu.

"Proses seleksi perangkat desa juga sama dengan PNS. Tapi perangkat desa tidak memiliki gaji tetap, tidak memiliki tunjangan kesehatan dan hari tua. Perangkat desa adalah faktor kunci dalam meraih kesuksesan pembangunan. Kami dari Gerindra mengusulkan

secara bertahap, mulai tahun anggaran 2013 perangkat desa diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau minimal statusnya sama," ujar Sadar.

RUU Desa yang kini tengah dibahas di DPR, diharapkan akan rampung tahun ini. Berdasarkan amanat yang diberikan, maksimal pada Desember 2012 undang-undang itu telah disetujui dan disahkan. Kehadiran RUU Desa nantinya akan menjadi payung hukum bagi keragaman desa di Tanah Air dengan segala kekhususannya.

Saat ini terdapat sekitar 68.000 desa di Indonesia dan sekitar 33.000 desa berada di wilayah hutan. Undang-undang ini akan menjadi penting, mengingat hingga kini orang Indonesia tetap terikat dengan desa karena hampir 90% masyarakat berasal dari desa. ◀ IF

Anak Harus Tumbuh Sehat dan Damai

ANAK-ANAK adalah aset bangsa. Anak-anak harus tumbuh dalam situasi sehat dan damai. Apalagi, dalam situasi banyak konflik, anak-anak sangat rentan terseret dalam situasi yang tidak menentu tersebut. "Dampak dari kondisi konflik sangat berbahaya dan harus dipikirkan konsekuensinya. Perlu dipikirkan pula trauma, baik fisik maupun psikisnya," kata anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra Sumarjati Arjoso, saat memberikan pandangan mengenai RUU *Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata).

RUU ini dinilai sangat penting. Sebab, bila terjadi perekrutan anak-anak secara paksa sebagai milisi atau angkatan bersenjata sama dengan melanggar hak anak. "Karena itu, Fraksi Partai Gerindra memandang wajib mensahkan konvensi ini," tambah Sumarjati.

Indonesia memiliki catatan konflik bersenjata, seperti konflik komunal dan separatisme. Memang, tidak ada catatan berapa anak-anak yang direkrut. Namun kondisi anak-anak di perbatasan sangat rentan dimanfaatkan. Itulah pentingnya Indonesia meratifikasi konvensi ini.

"Ratifikasi ini akan memberikan jaminan yang lebih kuat bagi masa depan Indonesia untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak, khususnya dalam situasi konflik bersenjata. Selain itu, Indonesia akan tergabung dalam jaringan kerja sama global untuk meningkatkan perlindungan anak, terutama dalam situasi konflik bersenjata," kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, pada kesempatan Rapat Kerja Komisi VIII.

Saat ini masih terdapat tantangan global dimana sejumlah konflik bersenjata di berbagai belahan dunia masih melibatkan anak-anak, baik direkrut untuk menjadi prajurit atau tentara anak maupun kerap menjadi sasaran dan dijadikan sebagai bagian strategi perang oleh angkatan bersenjata suatu negara ataupun kelompok bersenjata non-negara. Terdapat kurang lebih 10.000 anak terlibat dalam konflik bersenjata di setidaknya 15 negara.

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata mempertegas pelarangan anak di bawah umur 18 tahun untuk dilibatkan secara langsung dalam konflik bersenjata. Substansi protokol opsional ini sejalan dengan semangat konstitusi maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, termasuk dalam konflik bersenjata, serta melarang perekrutan atau pemanfaatan anak untuk kepentingan militer dan mengatur kriminalisasi atas tindakan tersebut. ◀ IF

Gerindra Dorong Kampanye Dialogis

PROSES demokratisasi melalui pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) ternyata menimbulkan aspek yang tidak terpikirkan sebelumnya. Misalnya, naiknya kepala daerah yang masih dalam satu keluarga, seperti dalam dinasti. Maraknya politik uang dan pengelolaan kekayaan alam daerah secara serampangan, hanya demi kekayaan segelintir orang.

Proses pemilihan kepala daerah yang terjadi saat ini terkadang sudah di luar batas kewajaran. Sebab, calon kepala daerah yang sebelumnya dikenal tidak memiliki banyak kekayaan, justru bisa membiayai pemilukada dengan dana yang sangat besar. Salah satu penyebabnya adalah mahalnya biaya kampanye.

Fraksi Partai Gerindra memiliki pandangan bahwa kampanye akbar yang sering digelar dalam setiap pemilukada sebaiknya dibatasi dan

diganti dengan kampanye dialogis. Dalam menyikapi RUU Pemilukada yang sekarang dibahas di Komisi II, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan, kampanye dialogis untuk mengurangi maraknya politik uang yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Kemudian, gubernur dipilih melalui DPRD, karena tidak melanggar konstitusi, sementara pemilihan bupati/wali kota tetap menggunakan mekanisme pemilihan langsung. Gerindra juga mengusulkan pemilihan wakil kepala daerah diatur dalam UU tersendiri, yakni UU tentang Pemilihan Wakil Kepala Daerah.

Pandangan Fraksi Partai Gerindra ini sebagian besar menyetujui usul dari pemerintah. Seperti, usul agar pemilukada tidak lagi memilih wakil kepala daerah. Kemudian, sependapat

dengan usul pemerintah yang melarang pencalonan kepala daerah yang memiliki hubungan kerabat dengan *incumbent* alias petahanan. Untuk yang satu ini, sebagian besar fraksi juga setuju.

Namun meminta pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) melakukan elaborasi atas pasal tersebut. Sebab, dikhawatirkan, pasal itu berpotensi dibatalkan di Mahkamah Konstitusi jika tidak memiliki landasan yang kuat.

Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, fakta bahwa 90% hubungan kepala daerah dengan wakilnya tidak harmonis memang terbukti. Ini disebabkan pemilihan kepala daerah selalu dilakukan dengan koalisi antarpol. Saat terpilih, mayoritas kepala daerah dengan wakilnya memilih pecah kongsi, karena kentalnya kepentingan parpol. ◀ IF



FOTO M. ASRIAN MIRZA

Fadli Zon Biola Sang Maestro

TEPAT 1 Juni lalu, merupakan hari bahagia bagi **Fadli Zon**. Saat itulah wakil ketua umum Partai Gerindra ini merayakan ulang tahunnya yang ke-41. Tidak heran bila sejumlah kenalan, aktivis dan juga seniman berdatangan ke Fadli Zon Library di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, untuk memberi ucapan selamat. Ada yang bernyanyi, membacakan puisi, atau sekadar bercanda. Tak lupa nasi tumpeng, sop buntut dan minuman segar mewarnai acara sederhana, namun meriah itu.

Tapi yang cukup istimewa adalah kehadiran maestro biola Idris Sardi. Idris yang datang menggunakan sarung khasnya dan berpeci memainkan beberapa lagu. Usai memainkan lagu dia menyerahkan biola yang dia mainkan kepada Fadli. "Biola kesayangan saya, saya beli di Amerika tahun 1985," katanya seraya menyerahkan kepada sohibul hajat. Fadli pun tampak kaget bercampur senang. Dia memerhatikan biola sang maestro setengah tidak percaya.

Rupanya, kado ulang tahun itu akan "dibayar" oleh Fadli dengan menerbitkan sebuah buku perjalanan Idris Sardi dalam khazanah musik di tanah air. "Bukunya sedang saya tulis. Nanti Juli akan diterbitkan," janjinya. Sebagian benda koleksi maestro seni ini memang tersimpan di Fadli Zon Library, seperti Piala Citra untuk kategori Penata Musik Terbaik. Beginilah bila seniman bertemu kolektor benda sejarah. Sama-sama memberi dan sama-sama memberi manfaat. ◀ IF

Iko Uwais dan Audy Item Akhirnya Menikah

KISAH cinta penyanyi **Audy Item** dan bintang film **Iko Uwais** berlanjut ke pelaminan, 25 Juni lalu. Mengambil tempat di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan, mereka bersanding menempuh kehidupan rumah tangga. Mereka berdua tampak bahagia. Hadir sebagai wali kakak Audy, Stevie Item yang juga seorang gitaris. Rupanya, Iko yang dikenal sebagai bintang film khusus bergenre laga, terutama silat, seperti *Merantau* dan *The Raid*, di sana tampak lebih lembut. Lelaki kelahiran Jakarta, 12 Februari 1983 ini, saat lamaran membawa roti buaya, tradisi Budaya Betawi tempat Iko dibesarkan dan menimba ilmu silat.

Berbeda dari pasangan selebritis lain, keduanya tidak memusingkan dengan urusan konsep pesta pernikahan. Mereka hanya menggunakan adat Sunda dan Betawi. Bahkan mereka lebih senang bila dilangsungkan secara sederhana, hanya mengundang sanak dan saudara yang jumlahnya tidak kurang dari 200 undangan. Namun, meski sederhana mereka berharap mendapatkan kelancaran dalam pernikahan. "Aku dan Iko berterimakasih atas ucapan dan doa dari semua," kata perempuan kelahiran 23 April 1983 ini. Sejumlah kenalan artis pun memberikan ucapan selamat melalui *tweeter*. Padahal menjelang hari bahagia itu, pelantun lagu *Pencuri Hatiku* itu mengaku tidak bisa tidur.

Iko pun tak lupa menyampaikan pujian buat sang istri melalui kicauan *tweeter*. *Thanks for the sincere love from you my future wife.* (Terima kasih atas cinta darimu, calon istriku, Audy)," kata Iko di akunnya. ◀ IF



FOTO-FOTO ISTIMEWA



Melly Goeslaw Menulis Sosiologi Musik

MAHIR menyanyi dan mencipta lagu, rupanya tak cukup bagi **Melly Goeslaw**. Dia pun kini berani mengeluarkan catatan hati berupa buku yang diberi judul "Balance", buku yang berkisah tentang sosiologi musik Indonesia. Buku itu diluncurkan Minggu, 24 Juni, di arena *Jakarta Book Fair*.

Melly mengaku inspirasi untuk menulis buku diperolehnya dari lingkungan sekitar, dan apa yang dirasakannya selama berkecimpung di industri musik. "Inspirasi sih enggak perlu yang gimana banget karena isinya apa yang saya pernah alami. Apa yang pernah saya rasakan dan saya lihat di lingkungan industri musik Indonesia. Itu semua diceritakan di buku ini. Kalau mau dibilang curhat, boleh, silakan saja. Tapi ini curhatnya lebih ke sosiologi musik," kata Melly.

Buku tersebut sebenarnya sudah selesai sejak akhir 2010, namun baru bisa dirilis saat ini. "Buku ini dikerjakan tahun 2011, mungkin 2010 akhir. Yang bikin lama bukan pengerjaannya. Buku ini ingin saya rilis bersamaan dengan album saya yang judulnya *Balance* juga," tambahnya.

Sebelumnya, penulis *soundtrack* film ini telah merilis buku pertamanya '10 Arrrrgh' pada 2007. Kreativitas Melly dalam tulis menulis boleh dibilang istimewa, sebab jarang penyanyi mau membuat buku apalagi mengenai dunia industri musik. ◀ IF

profil



A. Yani Muluk Perintis Gerindra di Bumi Anoa

Ketika diminta membangun Partai Gerindra di Sulawesi Tenggara, A. Yani Muluk masih tercatat sebagai anggota dewan di Provinsi Sultra mewakili partai berlambang Pohon Beringin. Karena sosok Prabowo Subianto, ia akhirnya merintis berdirinya Partai Gerindra di Bumi Anoa.

OLEH AGUSTAMAN

keberadaan Gerindra di Bumi Anoa. Apalagi sebagai partai baru, Gerindra belum banyak dikenal di sana. Keberadaan Gerindra di Sultra juga tak diperhitungkan oleh pimpinan pusat partai di Jakarta. Namun, sebagai putra daerah yang namanya cukup dikenal oleh masyarakat Sultra, khususnya Kendari, Yani pantang menyerah. Segala daya upaya dia kerahkan untuk mengenalkan Gerindra ke masyarakat.

"Saya coba hubungi kerabat, teman-teman terdekat dan masyarakat yang mengenal saya. Lalu bersama-sama kami membangun organisasi, melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk mengenalkan visi dan misi Gerindra. Saya tak punya modal apa-apa, semua dibantu teman-teman yang simpati dengan program Gerindra," papar putra ke-8 dari A. Muluk Tawang (Alm), mantan Komandan Kodim Kendari pertama.

Tak Sia-sia

Perjuangan pria yang kini sedang menempuh program S3 di Unhalu ini tak sia-sia. Setelah berpindah ke Gerindra dan mengikuti pemilu legislatif pada 2009, sebagai caleg Dapil 1 Sultra, Yani memastikan memperoleh jatah kursi ke-10 di daerah pemilihan yang memperebutkan 11 kursi tersebut. Yani meraih suara 4.246 dan ia menjadi satu-satunya wakil Partai Gerindra di DPRD Provinsi Sultra.

Meski begitu, perjuangannya membangun Gerindra di Sultra tak pernah surut. Bersama para pimpinan Gerindra tingkat DPD, DPC, dan PAC, serta sayap-sayap partai seperti PIRA, Satria dan TIDAR, ayah empat anak ini terus menyosialisasikan visi-misi dan program-program Gerindra lewat beberapa kegiatan. Misalnya, ketika Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke Kendari pada 2008 atau 6 bulan setelah Gerindra dideklarasikan, seluruh kader Gerindra Sultra bahu membahu menggelar acara silaturahmi dengan mantan Pang-

kostrad ini di sebuah perkampungan nelayan di sana.

Sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sultra, Yani juga banyak mengirim kader Gerindra ke Hambalang, Bogor. "Para kader muda yang kami ikutkan pelatihan telah kembali ke daerah masing-masing. Pelatihan tersebut guna memberikan pemahaman kepada kader muda tentang tata cara pengelolaan partai dengan baik dan bertujuan untuk memperkuat kredibilitas partai," tutur suami dari Hariani R. seorang PNS di Kota Kendari.

Ia berharap, para kader muda yang telah mengikuti pelatihan dapat menyosialisasikan pemahaman yang telah didapatnya selama mengikuti pelatihan beberapa hari di Hambalang.

Kini, bersama para kader dan simpatisan Gerindra Sultra, mantan Ketua KNPI Sultra ini menargetkan meraih kursi hingga mencapai satu fraksi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, selain di DPR RI tentunya, pada Pemilu 2014.

Selain itu, ia juga akan segera menindaklanjuti instruksi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, agar melakukan revisi kepengurusan. "Apakah kita tambah pengurus lama atau kita kurangi anggota pengurus yang tidak aktif, mulai pengurus ditingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga pengurus kelurahan," tambah Yani. Dengan beberapa strategi tersebut, Yani optimistis, target partainya untuk meraih satu kursi DPR RI, dan meraih kursi satu fraksi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota, akan terwujud.

"Namun, tugas utama yang harus kami wujudkan adalah menjadikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia mendatang. Ini bukan tugas ringan, tapi tetap harus dijalankan. Dan, kami, para pengurus, kader dan simpatisan Gerindra Sultra siap membantu mewujudkan cita-cita besar Gerindra tersebut," tegas Ketua FKPPi Sultra yang juga Ketua POBSI (Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia) Sultra ini. ◀

FOTO ALFIAN KARTIM

HUJAN yang kerap turun membasahi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada medio Juni 2012, nampaknya tak menjadi halangan bagi Ir. A. Yani Muluk, M.Si., dan kawan-kawan mengunjungi warung kopi Hj. Salmah. Kedai kopi yang terletak di ujung jalan Syekh Yusuf ini memang kerap menjadi langganan Yani dan kawan-kawan guna menikmati secangkir kopi, sembari berdiskusi informal mulai dari soal negara sampai bisnis.

"Tak hanya kami, warung kopi ini juga sering jadi tempat kongkow para aktivis partai politik, LSM, mahasiswa, pengusaha, pejabat dan masyarakat umum," papar Yani membuka pembicaraan dengan Tabloid *Gema Indonesia Raya*. "Di sinilah, kami, beberapa perintis Partai Gerindra Sultra sering mengadakan pertemuan, membahas apa yang bisa dan akan kami lakukan untuk partai yang terbilang baru waktu itu, tahun 2008," sambungnya.

Yani agaknya ingin menunjukkan beberapa tempat di Kota Kendari yang menjadi bagian dari sejarah Gerindra Sultra. "Tak cuma kedai kopi ini, ada juga tempat lain yang kami pakai untuk memulai aktivitas Gerindra Sultra. Kami pernah sewa ruang di sebuah hotel sebagai kantor awal kami selama berbulan-bulan, sebelum akhirnya punya kantor sendiri yang kami beri nama Kantornya Gerindra," kata Ketua DPD Gerindra Sultra ini.

Pikiran insinyur sipil ini kembali melayang ke masa-masa ketika Gerindra belum dideklarasikan. Ketika itu, Yani masih duduk sebagai anggota dewan dari parpol berlambang pohon beringin. Sudah tiga periode Yani menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sultra. Bahkan, ketika pertama kali duduk di kursi dewan, Yani terbilang anggota termuda saat itu.

"Suatu hari saya diundang ke Jakarta, bertemu dengan para deklarator Gerindra, termasuk Pak Prabowo Subianto. Mereka tanya kesiapan saya membangun Gerindra di Sultra dan meninggalkan partai saya sebelumnya. Saya jawab siap," cerita pemegang master ekonomi dari Universitas Negeri Haluoleo Kendari ini.

Apa yang membuat Yani mengiyakan permintaan itu? "Sosok Prabowo Subianto sebagai ikon Partai Gerindra menjadi salah satu alasan saya bergabung dan menjadi pionir Gerindra di Sultra. Waktu itu Prabowo masih tercatat sebagai fungsionaris partai besar. Bila setelah Gerindra dideklarasikan, beliau keluar dari partai itu, saya juga akan mengikuti jejaknya. Terbukti, setelah Gerindra berdiri, Prabowo keluar dari partai sebelumnya, saya pun demikian," ujar pria kelahiran Makassar tahun 1966.

Diakui Yani, bukan hal mudah merintis